Bayang-Bayang JETP dalam Konflik Rantai Pasok Energi Hijau Pulau Rempang

Bayang-Bayang JETP dalam Konflik Rantai Pasok Energi Hijau Pulau Rempang

September 2024

“Bayang-Bayang JETP dalam Konflik Rantai Pasok Energi Hijau Pulau Rempang"

Penerbit	: Trend Asia; Transparency International Indonesia; Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI); Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI); Perhimpunan Bantuan Hukum & Hak Asasi Manusia (PBHI); WALHI Riau; LBH Pekanbaru; Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA); Komisi untuk Orang Hilang & Korban Tindak Kekerasan (KontraS); & Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN).
Penulis	: Bagus Pradana; Fahmi Rizki Fahroji; Ferdian Yazid; Twina Paramesthi; & Zakki Amali
Peninjau	: Ahmad Ashov Birry
Fotografer	: Yogi Eka Sahputra
Design & Layout	: Taqi

Temuan-Temuan Kunci

- Proyek Rempang Eco City, yang dilabeli sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), dipromosikan sebagai proyek hijau dan ramah lingkungan. Namun, proyek ini tidak memperhatikan dampak sosial dan budaya terhadap masyarakat adat yang telah menetap di wilayah tersebut selama ratusan tahun. Penggusuran paksa, konflik agraria, dan bentrok dengan aparat keamanan menjadi dampak langsung dari proyek ini.

- *Just Energy Transition Partnership* (JETP) yang bertujuan untuk mengkatalisis transisi energi yang berkeadilan antara lain dengan mendorong penguatan rantai pasok energi terbarukan, pada praktiknya dalam proyek seperti *Rempang Eco City* justru menunjukkan ketidakadilan sosial dan lingkungan. Program JETP seharusnya mendukung transisi energi yang inklusif dan adil, tetapi kenyataannya malah memperkuat ketimpangan dan marginalisasi masyarakat adat.

- Salah satu investor utama di Rempang adalah Xinyi Group, sebuah perusahaan China yang berencana membangun pabrik kaca untuk panel surya di Rempang. Meskipun dianggap mendukung penguatan rantai pasok energi terbarukan, rencana penggunaan PLTU batubara sebesar 2 GW oleh perusahaan ini menunjukkan bahwa proyek yang disebut hijau tidak lantas sepenuhnya ramah lingkungan.

- Proyek ini diwarnai oleh dugaan praktik korupsi dan konflik kepentingan. Terdapat indikasi bahwa proyek ini didorong oleh elit lokal dan global yang bekerja sama untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil dari konsesi tanah di Pulau Rempang. Struktur kepemilikan perusahaan yang kompleks dan keterlibatan perusahaan cangkang di negara suaka pajak semakin memperburuk situasi.

- *Rempang Eco City* masuk sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) secara kilat dengan abai pada hak-hak warga Rempang. Hal ini sama dengan dua PSN baru lainnya yang muncul kilat yaitu Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dan pengembangan Bumi Serpong Damai (BSD) yang dianggap sebagai bagian politik balas jasa.

- Penolakan masyarakat terhadap proyek ini memuncak pada bentrokan dengan aparat keamanan, yang mengakibatkan kekerasan dan intimidasi. Penindasan yang terjadi mencakup penggunaan gas air mata, intimidasi, serta kriminalisasi terhadap warga yang menolak penggusuran. Hal ini mengindikasikan bahwa proses konsultasi dan partisipasi publik dalam proyek ini sangat minim , dan hak-hak warga diabaikan.

- Laporan ini mendesak pemerintah untuk memastikan transisi energi yang adil dengan melindungi hak-hak komunitas adat dan marjinal, menghormati warisan budaya mereka, serta melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, laporan ini juga menyerukan peningkatan tata kelola dan transparansi untuk mencegah korupsi serta memastikan bahwa transisi energi dilakukan secara adil.

Demonstran aksi bela Rempang keluar dari Pengadilan Negeri Batam usai menjalani putusan sidang, 6 Maret 2024.

Daftar Isi

Daftar Isi

Temuan-Temuan Kunci iii
Pendahuluan: Nafsu Hilirisasi Rezim 1
Metodologi Penelitian 7
JETP dalam Lingkar Proyek PLTS & Pabrik Kaca Panel Surya 11
Analisis Keadilan dan Risiko Korupsi pada Rantai Pasok Energi Terbarukan 18
Penutup: Mencari Titik Tengah, Menaja Jalan Keluar 41
Daftar Pustaka 54

Daftar Tabel

Tabel 1. Skema Program Just Energy Transition Partnership 4
Tabel 2. Perusahaan Pemegang Kontrak Ekspor Listrik dari EMA Singapura 12
Tabel 3. Perusahaan atau Konsorsium Perusahaan yang Berencana Membangun PLTS Total 11,3 GW 13
Tabel 4. Perubahan Proyek Strategis Nasional Dari Tahun 2016-2024 23
Tabel 5. Profil Grideye Resources Limited (Ltd), Perusahaan Induk PT Makmur Elok Graha 39

Daftar Gambar

Gambar 1. Data Direktur Grideye Resources Limited (Ltd) 27

Gambar 2. Manajemen PT Makmur Elok Graha Sebelum Perubahan Website 27

Gambar 3. Manajemen PT Makmur Elok Graha Setelah Perubahan Website 28

Gambar 4. Foto-foto MoU dan MoA PT Makmur Elok Graha dengan Pemkot Batam dan Otorita Batam 30

Gambar 5. Pertemuan Tomy Winata bersama Xinyi dan Menteri Investasi 32

Gambar 6. Penandatanganan MoU PT Makmur Elok Graha bersama Xinyi 33

Gambar 7. Penandatanganan Mou PT Makmur Elok Graha bersama Xinyi Disaksikan Presiden Jokowi dan Menteri Investasi 34

Gambar 8. Foto Adithya Prakarsa Winata 35

Gambar 9. Adithya Prakarsa Winata Diskusi Tentang Rempang 36

Gambar 10. Pemegang Saham dan Struktur Perusahaan PT Makmur Elok Graha 38

Tim Solidaritas Nasional untuk Rempang menyampaikan orasi di depan warga, 7 September 2024

Pendahuluan: Nafsu Hilirisasi Rezim

Pada ajang adu gagasan calon wakil presiden di awal 2024, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden-terpilih, mengatakan akan mendorong transisi menuju energi hijau dengan menggenjot hilirisasi demi mewujudkan pembangunan rendah karbon dan *Net Zero Emission* pada tahun 2060. Semangat itu juga tampak digaungkan oleh Presiden-terpilih, Prabowo Subianto, yang berulang kali berangan-angan melanjutkan hilirisasi mineral di Indonesia.

Masifnya hilirisasi di tengah buruknya tata kelola serta minimnya transparansi tak pelak hanya menguntungkan segelintir elite, dan malah lebih banyak mengesampingkan hak hidup masyarakat adat, membahayakan keselamatan kerja, hingga menjadi modus perampasan tanah di beberapa tempat. Nasib buruh industri nikel di Morowali, contohnya, digadaikan pada nafsu hilirisasi. Bila dibiarkan demikian, kondisi masyarakat kita hanya akan menjadi rentan dalam rezim transisi yang tidak berkeadilan, sebagaimana yang terjadi di Pulau Rempang dengan rencana proyek hilirisasi mineral berupa pasir kuarsa menjadi kaca di Pulau Rempang, Batam, dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di sekitar Kepulauan Riau.

Di Rempang, permasalahannya lebih dari sekadar hilirisasi. Proyek Strategis Nasional (PSN) No. 7/2023 disahkan pada 28 Agustus 2023 oleh Peraturan Menko Perekonomian untuk mengakselerasi pembangunan kawasan industri yang dipromosikan "hijau" bernama Rempang Eco City. Proyek ini jelas terlihat tak peduli dampak sosial budaya yang menyertai.

Ketika proyek dilabeli PSN, proyek itu memperoleh beberapa keunggulan berupa percepatan pembangunan yang diupayakan oleh para menteri, gubernur, hingga bupati terkait regulasi, perizinan, percepatan waktu penyediaan lahan, dan jaminan keamanan politik. Namun kecepatan itu berdampak luas dan abai nilai-nilai keadilan. Perampasan tanah, bentrok antar aparat dan warga, sampai penggusuran ruang hidup kerap terjadi pada beberapa wilayah yang terdampak proyek PSN.

Hingga kini, pengembangan Rempang telah menimbulkan banyak isak tangis dan konflik vertikal rakyat *versus* pemerintah. Pemerintah memiliki kewajiban sesuai konstitusi untuk memastikan pemenuhan hak warga negara untuk mendapatkan keadilan dan lingkungan yang baik dalam melakukan transisi energi. Alih-alih melaksanakan komitmen *Just Energy Transition Partnership* (JETP) yang telah disepakati untuk melakukan transisi energi yang adil, pemerintah justru menjadi wajah menakutkan bagi rakyat tatkala sejumlah proyek kontroversial dan besar-besaran ini diinjeksi secara paksa di Rempang.

Namun, bagaimana sejatinya motif pemerintah Indonesia berkecimpung dalam komitmen JETP sebagai sebuah solusi transisi energi yang adil? Pertama-tama, perlu dipahami bahwa program JETP mencakup lima area fokus investasi, yaitu (1) pengembangan jaringan transmisi dan distribusi (jaringan interkoneksi) (2) pemensiunan dini dan managed phase-out PLTU batubara (3) percepatan pemanfaatan energi terbarukan tipe dispatchable (4) percepatan pemanfaatan energi terbarukan tipe variable (5) membangun rantai pasok energi terbarukan.

Demo warga Rempang di depan Kantor BP Batam, 23 Agustus 2024.

Saat ini, mengacu pada area investasi pertama, ada sebuah upaya untuk mengurangi emisi *fossil fuel* dari sektor pembangkitan listrik secara langsung. Fakta bahwa Indonesia menghadapi kelebihan listrik setara 7 Gigawatt (GW) melampaui rasio ideal untuk cadangan listrik, yakni 24-35% dari beban puncak. Sementara saat ini rasionya berbeda-beda di setiap pulau: Jawa-Bali rasionya 44%, pulau Kalimantan 57%, Sumatera 24%, Lombok 37% dan Sulawesi Bagian Selatan 25%. Agar masalah *oversupply* tidak terulang, salah satu pekerjaan rumah Indonesia ke depan menuntut untuk bertransisi dengan cara memensiundinikan PLTU yang bahan bakarnya berasal dari batubara. Hal ini penting untuk mencapai titik keseimbangan di mana saat terjadi penambahan pembangkit listrik energi terbarukan, terjadi pengurangan signifikan dari pembangkit listrik energi fosil yang melepaskan banyak sekali emisi ke atmosfer.

Tentu bukan barang murah. Upaya mengurangi emisi dari sektor pembangkit listrik energi fosil menuntut pengeluaran dan biaya yang besar. Estimasi nilainya mencapai Rp3.500 triliun atau setara USD 246 miliar (estimasi kurs Rp15,000)—melebihi anggaran nasional setahun. Kebutuhan dana yang besar untuk melakukan transisi menghimpit Indonesia di posisi yang sulit. Singkatnya, ketika Indonesia tidak dapat meninggalkan kecanduan energi fosil, pemerintah berpaling untuk menguranginya dengan cara bergantung pada bantuan dari luar negeri.

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali, Indonesia pada akhir 2022, terjadi kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan negara-negara anggota International Partners Group (IPG) dan lembaga keuangan global di bawah Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ). Kesepakatan itu diterjemahkan dalam program JETP di mana negara-negara tersebut menyepakati untuk memberikan pinjaman kepada Indonesia untuk bertransisi dengan nilai kesepakatan mencapai USD 21,7 miliar[1] dari sebelumnya USD 20 miliar atau naik 8,4%.

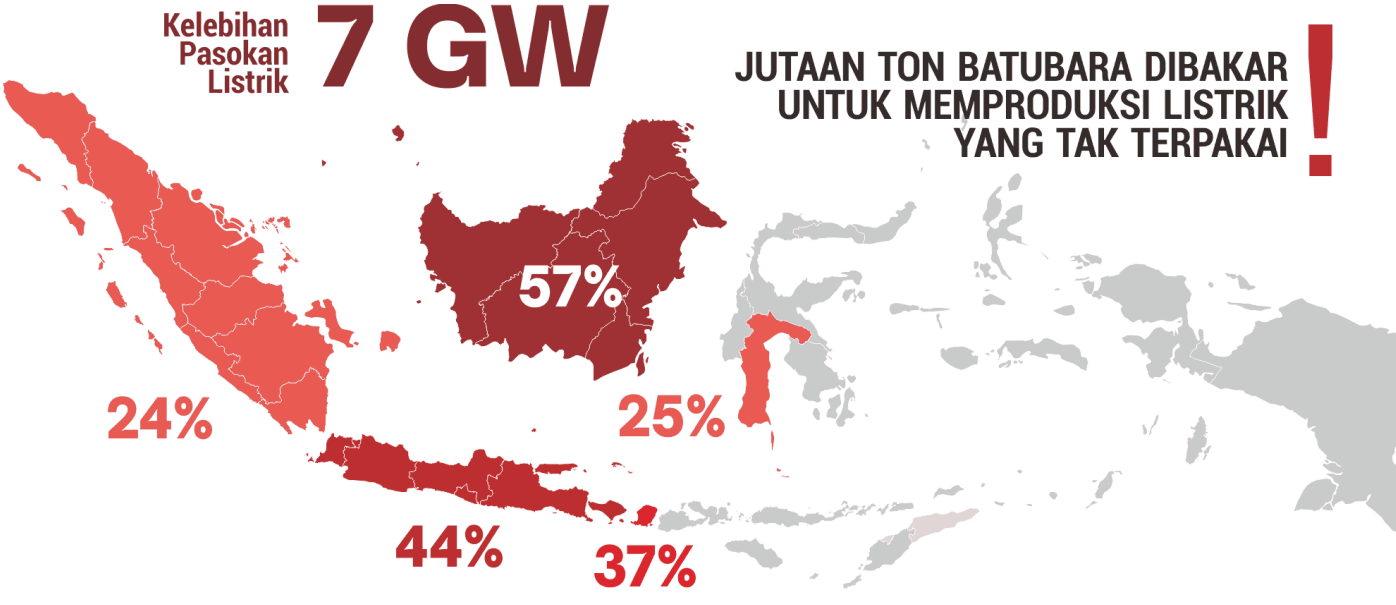

[1] PLN to Revise Electricity Procurement after JETP Investment Completed, https://dinsights.katadata.co.id/read/2023/06/26/pln-to-revise-electricity-procurement-after-jetp-investment-completed, diakses 23 Juli 2024.

Kendati demikian, program bantuan ini tampaknya hanya mampu mencukupi sekitar 8,8% dari USD 248 miliar total dana transisi yang diperlukan oleh Indonesia. Dana ini juga didominasi oleh hutang, sejauh ini komposisi hibahnya hanya sekitar 1,4% yaitu terdiri atas USD 155 juta berupa hibah dan USD 157 juta untuk bantuan asistensi teknis. Secara garis besar komposisi dana JETP terdiri dari USD 11,7 miliar berasal dari dukungan pendanaan publik dari IPG dan USD 10 miliar dalam pembiayaan komersial dari GFANZ. Pemerintah Indonesia masih berjuang untuk mendapatkan hibah yang lebih besar serta berusaha agar bunga pinjaman menjadi rendah atau lunak.

Tabel 1.
Skema Program *Just Energy Transition Partnership*

Nilai: US$ 21,7 miliar		**Penyaluran Dana**: 3-5 tahun	
Komposisi Dana	• 53% (US$ 11,7 miliar) negara-negara G7 • 47% (US$ 10 miliar) sektor swasta	**Bentuk Perjanjian**	• Nol emisi bersih sektor energi pada 2050 • Pensiun pembangkit listrik tenaga batu bara • Mengurangi emisi energi fosil pada tahun 2030 maksimal 290 juta ton CO2.
Bentuk Dana	Pinjaman konsesional, pinjaman komersial , jaminan Bank Pembangunan Multilateral (MDB), hibah, bantuan teknis, dan investasi ekuitas.	**Donor dari Sektor Swasta**	Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) melibatkan grup perbankan dan manajer aset
Negara Donor	Jepang, Amerika Serikat, Kanada, Denmark, Eropa, Prancis, Jerman, Italia, Norwegia, Inggris	**Perbankan GFANZ**	Bank of America Corp., Citigroup Inc., Deutsche Bank AG, HSBC Holdings Plc, Standard Chartered Plc, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. and Macquarie Group Ltd
Komposisi Dana Donor Negara		**Program**	
• Negara-negara Eropa sekitar US$ 2,5 miliar. • Kemitraan melalui European Investment Bank/Bank Investasi Eropa (EIB) dengan €1 miliar untuk mendukung proyek-proyek yang berkontribusi pada dekarbonisasi sistem tenaga listrik Indonesia. • Eropa hanya akan mengalokasikan €25 juta dalam bentuk hibah dan bantuan teknis. • Inggris antara lain melalui Jaminan Bank Dunia senilai US$1 miliar.		• Program ini tidak digunakan untuk membiayai proyek gas alam • Investasi yang dapat didukung termasuk meningkatkan manufaktur PLTS dan menegosiasikan kembali kontrak *take-or-pay* PLTU batubara untuk memfasilitasi penutupan PLTU. • 10 GW listrik di Indonesia akan dialihkan ke energi terbarukan • Beberapa pendanaan dapat digunakan untuk menegosiasikan ulang utang untuk PLTU yang ada, dengan tujuan untuk mempensiunkannya lebih awal.	

Sumber: Diolah dari Bloomberg D-Insights Katadata (1) Joint Statement JETP D-Insights Katadata (2)

SKEMA PROGRAM JUST ENERGY TRANSITION PARTNERSHIP

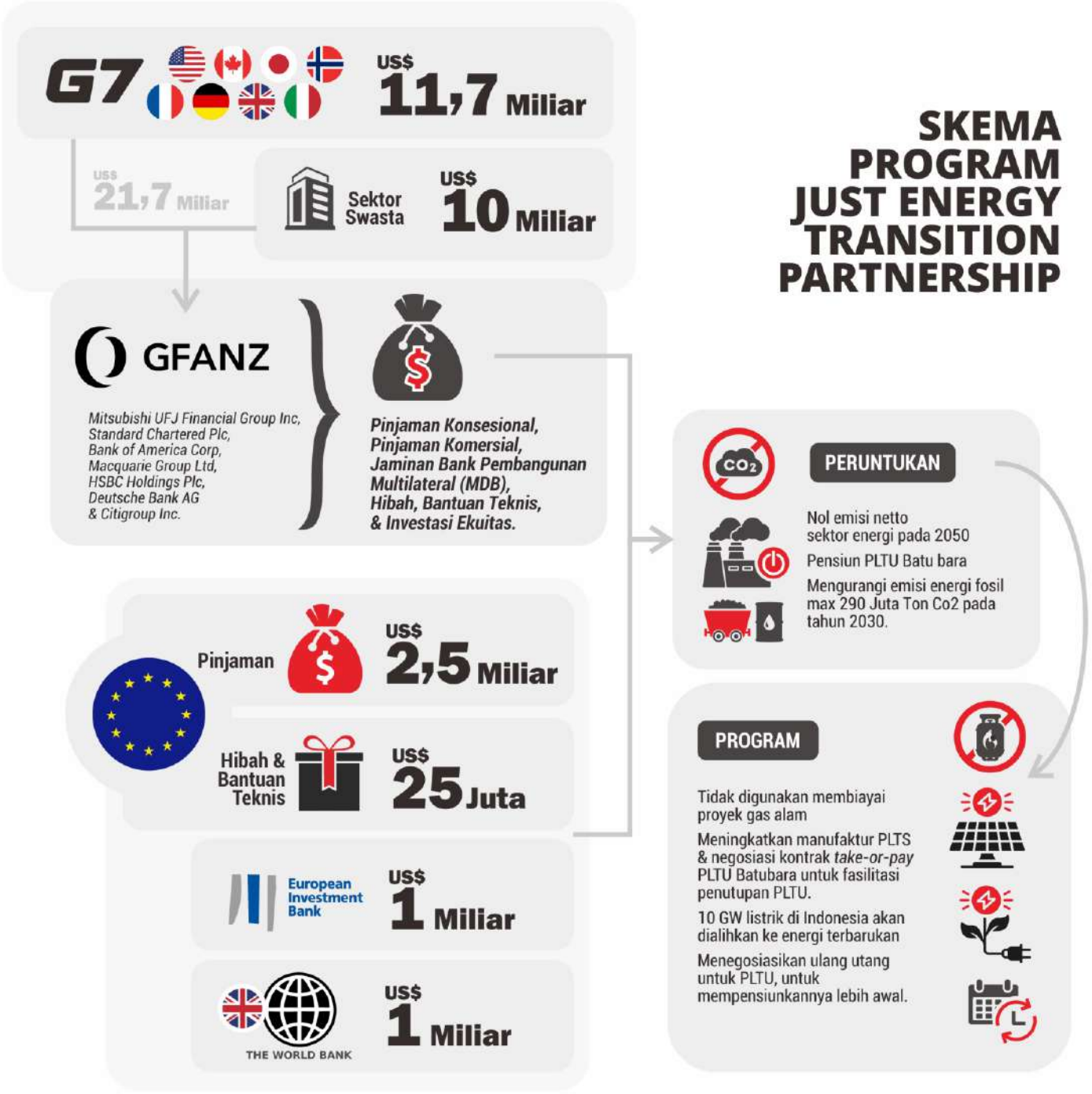

Selain masalah pendanaan yang telah menjadi diskursus publik, juga terdapat aspek keadilan yang perlu menjadi konsern bersama untuk memastikan adanya keadilan dalam transisi energi di Indonesia. Koalisi masyarakat sipil [2] menjadi salah satu entitas yang fokus mengadvokasi isu energi berpandangan bahwa pembangunan dan transisi energi harus berlandaskan nilai-nilai keadilan. Keadilan harus menjadi landasan bagi transisi energi agar amanat konstitusi Indonesia yang menghendaki terpenuhinya hak mendapatkan lingkungan yang baik dapat terlaksana dengan adil.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis aspek keadilan dalam rencana pembangunan energi terbarukan dan penguatan rantai pasok di Indonesia, khususnya dalam pembangunan pembangkit listrik energi surya (PLTS) skala besar di Kepulauan Riau dan pabrik kaca untuk panel surya di Rempang, Kepulauan Riau, Indonesia.

Dengan berfokus pada area investasi kelima dari Program JETP yakni tentang **penguatan rantai pasok energi terbarukan.** Penelitian ini mengeksplorasi tantangan dan peluang dalam mencapai keadilan dalam transisi energi, serta dampaknya terhadap masyarakat sipil. Penelitian ini menempatkan dinamika rantai pasok energi terbarukan di Kepulauan Riau sebagai studi kasus karena memiliki kriteria yang selaras dengan JETP. Analisis media [3] menyebutkan terdapat potensi pendanaan bagi proyek PLTS di Kepulauan Riau dari JETP karena proyek di sana merupakan bagian dari area fokus investasi JETP. Oleh karena itu, studi ini akan mencoba melihat apakah rencana pembangunan PLTS dan rantai pasok panel surya tersebut memenuhi aspek keadilan dari sudut pandang masyarakat sipil.

Panel Surya.
Sumber Foto: Pexel.com

[2] Koalisi Masyarakat Sipil Menyerukan Transisi Energi yang Berkeadilan, https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/10/20/koalisi-masyarakat-serukan-transisi-energi-yang-berprinsip, diakses 27 Juli 2024.

[3] Harvesting Sunshine in Indonesia's Riau Islands: Who's In, Who's Out?, https://dinsights.katadata.co.id/read/2023/06/12/harvesting-sunshine-in-indonesias-riau-islands-whos-in-whos-out, diakses pada 28 Juli 2024.

Metodologi Penelitian

Kajian ini berfokus pada analisis kritis untuk membongkar peta aktor dari PSN *Rempang Eco City* yang bermasalah dari sejak awal kemunculannya. Diawali dengan penggusuran paksa yang diwarnai kekerasan aparat terhad ap komunitas masyarakat lokal di Pulau Rempang hingga penggunaan gas air mata yang sempat menyasar anak-anak yang sedang bersekolah pada 7 September 2023 menjadi preseden buruk tentang carut marut proyek yang disinyalir akan mendapat pendanaan dari program *Just Energy Transition Partnership* (JETP) ini. Bertujuan untuk melengkapi kajian-kajian lain yang telah secara mendalam membahas pelanggaran HAM yang dilakukan negara kepada komunitas masyarakat di Pulau Rempang, kajian ini difungsikan untuk memberikan pengayaan perspektif mengenai seberapa kontroversialnya proyek ini, yakni melalui analisis peta aktor untuk menjelaskan siapa saja sosok-sosok yang menjadi pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) dari PSN Rempang Eco City. Pengetahuan tentang pemilik manfaat dari suatu proyek pembangunan menjadi penting sebab pengetahuan tersebut merupakan hak dasar yang seharusnya diperoleh warga masyarakat terdampak.

Plang pulau Rempang.

Kajian ini dilakukan dengan mengkombinasikan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya:

1. **Desk Research**

   Kajian ini dimulai dengan pengumpulan data menyeluruh melalui *Desk Research* yang komprehensif. Desk research adalah jenis penelitian yang didasarkan pada peninjauan materi (studi literatur) yang diterbitkan dalam laporan dan dokumen sumber yang akan dikaji yang tersedia di perpustakaan umum, situs web, maupun data yang diperoleh dari kajian yang telah dilakukan sebelumnya, dan sebagainya.[4] Dalam kajian ini sumber data yang digunakan termasuk laporan resmi pemerintah terkait proyek PSN Rempang Eco City, laporan yang diproduksi perusahaan pemegang konsesi, dokumen hukum mengenai perizinan dan pelaksanaan proyek, laporan media dan investigasi independen terkait konflik agraria dan penggusuran masyarakat di Pulau Rempang, serta kajian akademis lain yang relevan dengan kasus di Pulau Rempang. Fokus utama dari studi literatur ini adalah untuk mengidentifikasi dan memahami konteks kebijakan, aktor yang terlibat, serta berbagai dimensi konflik yang muncul dalam PSN Rempang Eco City.

2. **Identifikasi Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership - BO)**

   Analisis mengenai pemilik manfaat (*Beneficial Ownership*) menjadi bagian penting dalam kajian ini. Dalam rangka mengidentifikasi kepentingan ekonomi yang bermain di balik proyek ini, kajian ini memanfaatkan data dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) yang digunakan untuk menelusuri kepemilikan entitas bisnis yang terlibat dalam proyek Rempang Eco City. Tujuannya adalah untuk mengungkapkan konflik kepentingan (Conflict of Interest) yang mungkin tersembunyi dibalik struktur perusahaan pemegang konsesi PSN Rempang Eco City. Selain itu, kajian ini juga ditujukan untuk menilai apakah terdapat potensi keterlibatan kepentingan entitas asing yang mempengaruhi pelaksanaan proyek ini.

3. **Akses Data ke Institusi Perizinan dan Pelaporan BO Luar Negeri**

   Untuk memperluas cakupan dalam kajian ini, peneliti juga mengakses data perizinan dan pelaporan BO di luar negeri yang bersinggungan dengan perusahaan yang terlibat dalam proyek pengembangan Rempang Eco City. Hal ini bertujuan untuk menelusuri aliran modal dan kepentingan internasional yang mungkin terlibat dalam proyek tersebut. Analisis ini penting untuk memahami jaringan global yang berkontribusi terhadap proyek tersebut dan dampaknya terhadap masyarakat lokal.

---

[4] Moore, Nick., *How to do research: a practical guide to designing and managing research projects* (Facet publishing, 2006). Hlm. 106.

4. **Analisis Media**

Sebagai langkah due diligent (Uji Tuntas), kajian ini juga diperkuat dengan analisis media yang mendalam untuk menginterpretasikan informasi atau memahami narasi yang berkembang di publik [5] khususnya mengenai proyek Rempang Eco City. Analisis ini membantu mengidentifikasi bias, framing, dan representasi dalam narasi tentang konflik negara vs masyarakat dalam konteks pembangunan proyek PSN di Pulau Rempang yang terbangun di media massa. Media massa acap kali memiliki peran penting dalam membentuk opini publik dan sering dijadikan legitimasi dari kebijakan pemerintah maupun proyek-proyek besar seperti PSN Rempang Eco City. Oleh karena itu, analisis media akan sangat berguna khususnya untuk menggambarkan kronik perjalanan proyek ini, termasuk perdebatan mengenai label kawasan industri "hijau" yang terus ditekankan oleh para pemangku kepentingan PSN Rempang Eco City.

Setelah data kajian dianalisis, sebagai bentuk triangulasi dan pertanggung jawaban ilmiah atas kajian ini, peneliti berkirim surat kepada ke PT Makmur Elok Graha selaku pihak perusahaan pemegang konsesi dan pengembang PSN *Rempang Eco City* untuk meminta klarifikasi atau hak jawab terkait hasil kajian. Terkait dengan periode surat hak jawab ini, peneliti memberi waktu kepada perusahaan untuk membalas surat resmi yang telah dikirimkan dalam jangka waktu 7 hari (satu minggu) sejak 3-10 September 2024. Namun manajemen PT Makmur Elok Graha tidak menjawab surat permohonan klarifikasi atau hak jawab tersebut hingga tenggat waktu yang diberikan. Pertanyaan peneliti berkaitan dengan temuan-temuan riset di dalam laporan ini terkait keterlibatan PT Makmur Elok Graha.

Harapannya, kajian ini dapat menjadi dasar bagi advokasi yang lebih kuat khususnya untuk komunitas masyarakat di Pulau Rempang, serta untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi proyek berskala nasional PSN Rempang Eco City. Selain itu, kajian ini juga menawarkan wawasan kritis terhadap narasi transisi energi dan bagaimana program *Just Energy Transition Partnership* (JETP) perlu dievaluasi ulang dari perspektif keadilan sosial dan penghormatan atas Hak Asasi Manusia (HAM).

[5] Deacon, David., Michael Pickering, Peter Golding, & Graham Murdock, *Researching communications: A practical guide to methods in media and cultural analysis* (Bloomsbury Publishing USA, 2021) Hlm. 8-10

Lokasi pembangunan rumah relokasi warga terdampak PSN Rempang Eco City,

JETP dalam Lingkar Proyek PLTS & Pabrik Kaca Panel Surya

Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Batam 2023-2032, terdapat usulan pembangunan PLTS sebesar 126 MW [6] atau setara 14,6% dari 860 MW total kapasitas tambahan yang diusulkan dalam 10 tahun. Rencana ini ditujukan semata-mata untuk menggenjot transisi ke bauran energi terbarukan, di mana target bauran energi terbarukan di Batam yang hendak dicapai 35% pada tahun 2032. Rencana proyek ini nantinya akan tersebar di berbagai wilayah di Kepulauan Riau dan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik lokal, tetapi juga dimaksudkan untuk ekspor listrik ke Singapura. Upaya mengekspor listrik yang berasal dari energi terbarukan ke Singapura merupakan salah satu bentuk implementasi rencana ASEAN Power Grid (APG) yang kesepakatannya telah ditandatangani sejak awal tahun 2000-an silam. APG bertujuan untuk mengintegrasikan sistem kelistrikan [7] 10 negara yang berada di kawasan Asia Tenggara baik melalui perdagangan listrik bilateral maupun multilateral.

Secara konkret, rencana pembangunan PLTS oleh PLN Batam menyepakati untuk melibatkan pengusaha dan pemerintah Indonesia dengan otoritas pasar energi Singapura untuk memenuhi permintaan ekspor listrik. *Energy Market Authority* (EMA)—sebuah otoritas pasar energi di bawah Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura—telah memberikan persetujuan bersyarat (*conditional approval*) untuk proyek pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 600 MW dengan mengimpor listrik rendah karbon sebesar 2 GW dari Pulau Bulan, Indonesia ke Singapura dengan teknologi penyimpanan energi pada baterai. Salim Group—konglomerat Indonesia—merupakan salah satu perusahaan yang akan berpartisipasi dalam proyek tersebut. Dia menyatakan akan melakukan penyaluran listriknya itu melalui kabel bawah laut bertegangan tinggi di kawasan perairan Batam. Pada akhir 2027, [8] ekspor listrik dari Indonesia ke Singapura ditarget telah terjadi.

---

6 Sahkan RUPTL PT PLN Batam 2023-2032, Pemerintah Dukung PT PLN Batam Tingkatkan Keandalan Sistem, https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/sahkan-ruptl-pt-pln-batam-2023-2032-pemerintah-dukung-pt-pln-batam-tingkatkan-keandalan-sistem, diakses Juni 23 2024.

7 ASEAN Power Grid Enhancing Electricity Interconnectedness, https://asean.org/wp-content/uploads/images/2015/October/outreach-document/Edited%20APG-3.pdf, diakses 21 Juli 2023.

8 Singapore's Plan to Import Indonesia's Clean Energy Is Advancing, https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-09-08/singapore-s-plan-to-import-indonesia-s-clean-energy-is-advancing, diakses 28 Juli 2024.

Dari lima perusahaan yang melakukan kerja sama, tiga di antaranya berencana membangun pembangkit listriknya di Batam dan sekitarnya.

Tabel 2.
Perusahaan Pemegang Kontrak Ekspor Listrik dari EMA Singapura

Perusahaan	Kapasitas Import (GW)	Rencana Lokasi PLTS
• Pacific Medco Solar Pte Ltd (formed by PacificLight Renewables Pte Ltd) • Medco Power Global Pte Ltd • Gallant Venture Ltd	0,6	Pulau Bulan, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau
Adaro Solar International Pte Ltd. (formed by PT Adaro Clean Energy Indonesia)	0,4	Bendungan Duriankang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau
EDP Renewables APAC	0,4	N/A
• Vanda RE Pte Ltd, formed by Gurin Energy Pte Ltd • Gentari International Renewables Pte Ltd	0,3	Kabupaten Karimun, Provinsi Riau
Keppel Energy Pte Ltd	0,3	N/A

Sumber: Diolah dari EMA dan berbagai rilisan media

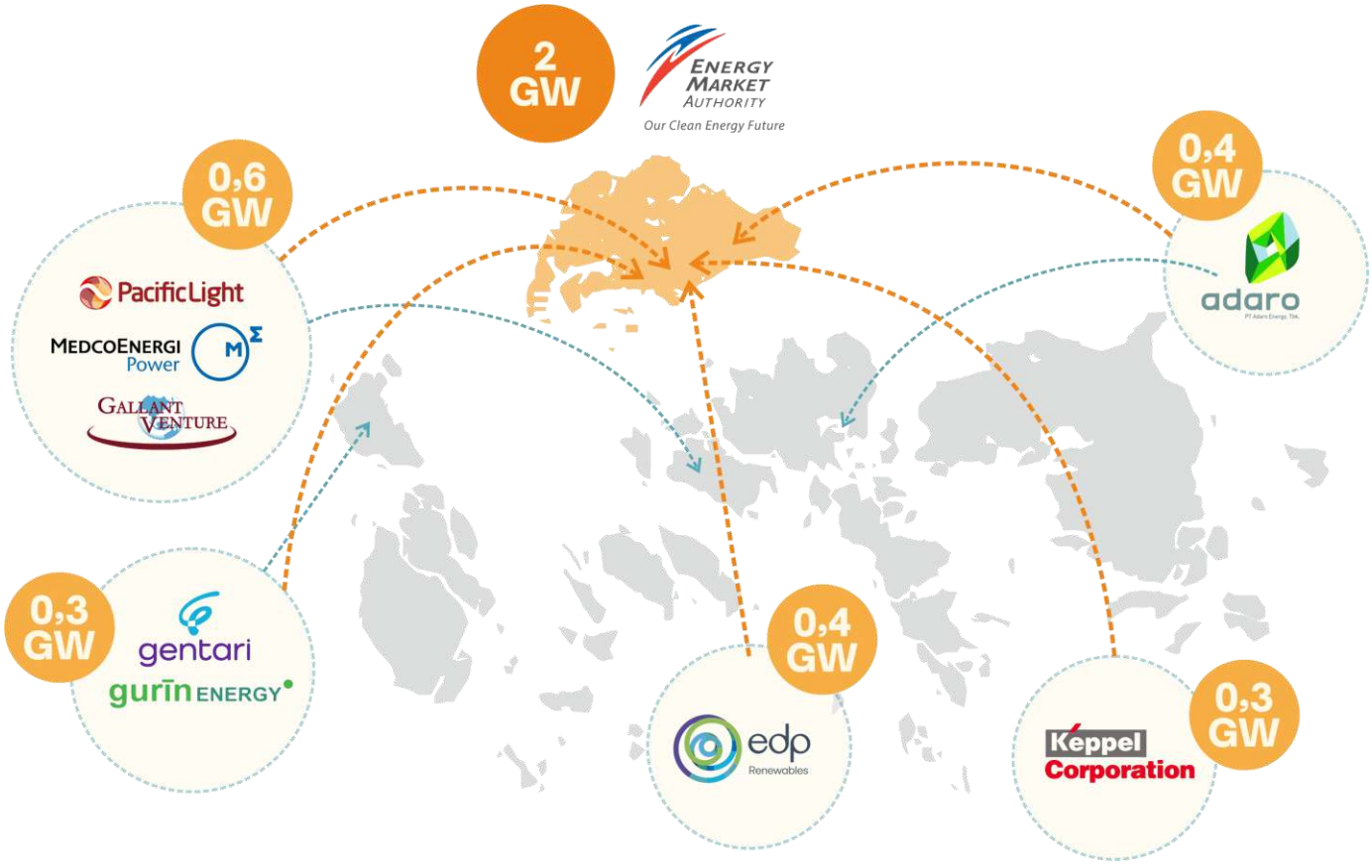

Terdapat proyek pembangunan PLTS lain untuk keperluan ekspor listrik yang diajukan dan akan dibangun beberapa perusahaan di Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Riau. Ada sembilan perusahaan atau konsorsium perusahaan yang menyatakan minat dengan total kapasitas PLTS sebesar 11,3 GW.

Tabel 3.
Perusahaan atau Konsorsium Perusahaan
yang Berencana Membangun PLTS Total 11,3 GW

No	Perusahaan	Kapasitas (MW)	Rencana Lokasi PLTS
1	PT Adaro Energi Indonesia	720	Bendungan Duriangkang, Batam, Kep. Riau
2	PT Batam Sarana Surya (Adaro Group)	120	Bendungan Duriangkang, Batam, Kep. Riau
3	PT Toba Bara Energi (TBS Group)	333	Bendungan Tembesi, Batam, Kep. Riau
4	PT TBS Energi Utama (TBS Group), PT PLN Batam, & PT PLN Nusantara Power	42	Bendungan Tembesi, Batam, Kep. Riau
5	PacificLight Power Ltd, Medco Power, & Gallant Ventures Ltd	670	Pulau Bulan, Batam, Kep. Riau
6	PT Calypte Energy Indonesia & PT Terragama Hariara Energi	1.200	Batam, Kep. Riau & Bengkalis, Riau
7	PT Indonesia Power, EDF Renouvelables SA, Tuas Power Ltd, & Abu Dhabi Future Energy Company PJSC (Masdar Group)	2.800	Pulau Kundur & Pulau Alai, Kab. Karimun, Riau
8	Quantum Power Asia & Ib Vogt	3.500	Pulau Karimun, Kab. Karimun, Riau
9	Gurin Energy Ltd & Infratil Ltd	2.000	Pulau Karimun, Kab. Karimun, Riau
	Total	**11.385**	

Sumber: Diolah dari pemberitaan, website perusahaan, dan BP Batam.

Meskipun berencana untuk meningkatkan permintaan dan akses listrik di suatu negara melalui sumber energi terbarukan, namun APG dan proyek energi terbarukan lainnya harus tetap memperhatikan prinsip dan nilai keadilan dalam proses konstruksinya. Oleh karena itu, hal ini menjadi ironis ketika mengetahui bahwa situasi krisis listrik yang tengah berlangsung di Batam, tempat yang dijadikan sebagai *solar farm* untuk ekspor listrik ke Singapura, mengindikasikan ketidakpatuhan terhadap prinsip keadilan karena kota tersebut sedang menghadapi masalah serius dalam pasokan listrik. Bahkan, PLN minta masyarakat di Batam untuk menyalakan genset akibat krisis listrik[9].

Persoalan transisi energi pada pembangunan PLTS di Batam sejatinya hanya sebilah dinamika dari keseluruhan permasalahan yang ada. Inisiasi rantai pasok panel surya merupakan sebilah rencana lainnya dalam pembangunan *Rempang Eco City* yang saat ini sangat kontroversial. Dalam hal pembuatan panel surya, kaca menjadi salah satu komponen bersama dengan aluminium, tembaga, silicon, dan perak. Fungsi kaca pada panel surya yaitu sebagai penghalang penting yang melindungi sel PV (*photovoltaic*) surya dari air, uap, dan kotoran, yang dikenal sebagai faktor eksternal yang merusak panel surya.[10] Kaca juga merupakan dasar cermin yang digunakan untuk memusatkan sinar matahari, sehingga memberikan refleksi rendah dan transmisivitas tinggi untuk menghasilkan listrik.

Sebagai salah satu produsen kaca dan panel surya terbesar[11], perusahaan asal China bernama Xinyi Group diketahui akan membangun kawasan industri di Rempang. Saat ini China mendominasi rantai pasok PV global dalam semua tahap pembuatan panel surya (seperti polysilicon, ingot, wafer, sel, dan modul) melebihi 80%[12]. Jumlah ini lebih dari dua kali lipat pangsa China dalam permintaan PV global. Xinyi berencana memakai pembangkit listrik tenaga batubara berkapasitas 2.500 MW.[13] Penggunaan PLTU batubara ini menunjukkan industri energi terbarukan berupa sel surya tidaklah hijau sepenuhnya alih-alih kotor. Kawasan industri Xinyi di Rempang itu diklaim dapat menggaet investasi sebesar Rp 381 triliun hingga 2080 dan mampu menciptakan lapangan kerja bagi 30 ribu orang. Untuk membangun industri hilirisasi pasir laut menjadi kaca ini, Xinyi akan mengeluarkan dana hingga US$11,6 miliar (setara Rp174 triliun).

---

9 Batam Kekurangan Listrik, PLN Minta Pelanggan Industri Nyalakan Genset, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230522131216-85-952406/batam-kekurangan-listrik-pln-minta-pelanggan-industri-nyalakan-genset, diakses 24 Juli 2024.

10 Solar Glass Panels: A Review, https://www.researchgate.net/publication/346727470_Solar_Glass_Panels_A_Review, diakses Juni 2024.

11 Xinyi Glass (About Us), https://www.xinyiglass.com/en/company/index.aspx, diakses 27 Juli 2024.

12 Solar PV Global Supply Chains, https://www.iea.org/reports/solar-pv-global-supply-chains/executive-summary, diakses 26 Juli 2024.

13 Produksi Panel Surya, Xinyi Group Gunakan Energi dari PLTU di Rempang, https://katadata.co.id/berita/industri/651a8c1ce5ce7/produksi-panel-surya-xinyi-group-gunakan-energi-dari-pltu-di-rempang, diakses 27 Juli 2024.

Namun ada cerita di balik drama dan motif pembangunan megaproyek sekelas Rempang Eco City. Negara menjadi alat tangan pengusaha global, melalui kroni kapitalis di tingkat lokal, untuk membendung upaya transformasi yang tak jarang menyisakan korban. Demi kemajuan negara, mengacu pada argumen Polanyi (1941), buruh, masyarakat sipil dan lahan ruang hidup dianggap sebagai *false commodity* dalam sistem pembangunan besar-besaran, yang dalam konteks ini bisa kita anggap sebagai visi futuristik hijau Rempang Eco City. Artinya, privatisasi lahan dan proyek oleh pihak pengusaha di dua skema: PLTS dan rantai pasok panel surya, menjadi sah untuk dilakukan walaupun berdiri di atas tumpu pengorbanan masyarakat sekitar. Hal ini salah dan tidak boleh dibiarkan.

Dalam konteks area investasi kelima JETP, pendirian pabrik Xinyi dipandang sebagai salah satu solusi untuk memperkuat rantai pasok energi terbarukan karena menjawab salah satu kebutuhan untuk membuat panel surya dari dalam negeri.

JETP juga mendukung rantai pasok energi terbarukan karena terdapat kapasitas 2 GW di bagian hulu perakitan modul fotovoltaik (PV) di Indonesia, tapi hanya mampu memproduksi 160 MW modul PV. Pembangunan industri modul PV di dalam negeri dipandang mampu mencukupi kebutuhan. Sementara itu, permintaan panel surya diperkirakan akan meningkat seiring dengan tren transisi energi yang meningkat. Dari dalam negeri saja, pemerintah berencana memasang 420 gigawatt (GW) solar (PV) pada 2060. Mega proyek itu membutuhkan total investasi US$160 miliar. Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) disebut-sebut sebagai pilihan terbaik untuk mempercepat penggunaan energi terbarukan karena relatif lebih cepat dibangun dan lebih mudah dioperasikan dibandingkan pembangkit energi terbarukan lainnya. Apalagi potensi energi surya di Indonesia sangat besar, mencapai 4,8 kilowatt-jam per meter persegi (kWh/m2), atau sekitar 112.000 GWp.

Pemerintahan Prabowo-Gibran di masa depan akan menarget pertumbuhan ekonomi 8%. Salah satunya ditopang dengan hilirisasi. Pasir silika/kuarsa (quartz) dipandang sebagai "new nickel" karena potensinya di Indonesia mencapai 25 miliar ton. Kandungan Silika Dioksida (SiO2) dalam kuarsa sebesar lebih dari 99% ada di Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalbar, Kalteng, dan Kalsel. Kuarsa ini merupakan bahan baku utama kaca yang dibutuhkan industri pembuat modul PV. Fungsi kaca pada panel surya yaitu sebagai penghalang penting yang melindungi sel PV dari air, uap, dan kotoran, yang dikenal sebagai faktor eksternal yang merusak panel surya. Kaca juga merupakan dasar cermin yang digunakan untuk memusatkan sinar matahari, sehingga memberikan refleksi rendah dan transmisivitas tinggi untuk menghasilkan listrik.

Rencana investasi perusahaan produsen kaca untuk solar PV di Rempang dapat didudukkan dalam konteks transisi energi JETP. Pertanyaannya adalah apakah kerangka berpikir JETP mengakomodasi aspek keberpihakan terhadap warga. Ada penolakan warga yang sangat kuat untuk tidak menjadikan Rempang sebagai kawasan industri kaca PV. JETP seharusnya tidak mendukung proyek rantai pasok energi terbarukan jika masyarakat di mana proyek tersebut akan dilakukan menolak. Jika pembangunan pabrik Xinyi dipaksakan, maka melanggar hak-hak warga. Tidak ada energi bersih dari rantai pasok yang melanggar hak-hak warga.

Unjuk rasa Warga Pulau Rempang
Menolak Proyek Rempang Eco City.

Analisis Keadilan & Risiko Korupsi pada Rantai Pasok Energi Terbarukan

Suatu saat di akhirat, penghuni neraka dan penghuni surga ingin saling kunjung. Maka penghuni kedua tempat itu sepakat membua t jembatan yang akan menghubungkan wilayah neraka dan wilayah surga. Bagian jembatan di wilayah neraka akan dibangun oleh orang neraka dan sebaliknya. Ternyata penghuni neraka lebih cepat menyelesaikan pekerjaannya daripada para penghuni surga. Dan ketika dicari sebabnya, ditemukan kenyataan di antara para penghuni neraka banyak mantan orang proyek.

– Ahmad Tohari, dalam novel "Orang-Orang Proyek" (2002)

'Mantan orang proyek' barangkali merupakan personifikasi dari para teknisi, birokrat, dan pengusaha yang dengan kuasanya mampu membuat proyek jitu dengan kesaktian yang dimiliki. Gambaran ini hanya sebentuk kiasan dalam proyeksi konflik di Pulau Rempang yang telah menyisakan subjek biner: 'menang' dan 'kalah'. Orang-orang non-proyek barangkali merupakan orang kalah dan kenyataan bahwa mereka mesti merasakan kepahitan di tengah ketidakadilan dunia (rantai pasok energi terbarukan) yang membuatnya ditempatkan sebagai penghuni surga. Bak imajinasi proyek yang menjanjikan, proposal *Rempang Eco City* memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan, namun perlu ditekankan bahwa proyek ini juga kontroversial karena mengakibatkan luka sosial, sentimen kesukuan, dan pengusiran penduduk asli dari tanah leluhur mereka.

Seorang perempuan warga Rempang melintas di spanduk penolakan reloaksi dan PSN Rempang Eco City, 7 Maret 2024.

Suara-Suara Warga yang Tak Didengar di Kelakar Konflik Rempang

Sebelum penetapan Rempang sebagai PSN, masyarakat menunjukkan penolakan yang kuat, mencapai puncaknya dengan demonstrasi besar pada 7 dan 11 September 2023. Saat suasana mencekam. Jalanan disesaki polisi bersenjata. Truk-truk militer berukuran besar bergerak dengan menakutkan di atas aspal, memantau situasi. Penduduk desa berdiri berkelompok. Mereka cemas dan beberapa di antara merekam secara diam-diam untuk mengunggah video kekerasan aparat negara ke media sosial, menunjukkan orang-orang terlempar ke tanah, berdarah-darah, dan dianiaya oleh aparat. Temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan investigasi awal dari Koalisi Solidaritas Nasional Untuk Rempang mengungkapkan bahwa peristiwa tersebut dinyatakan sebagai pelanggaran HAM sebagaimana diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.[14] Hal ini ditengarai karena aparat kepolisian menembakkan gas air mata yang mengakibatkan kepanikan, ketakutan, hingga luka fisik pada anak-anak yang sedang melakukan pembelajaran.

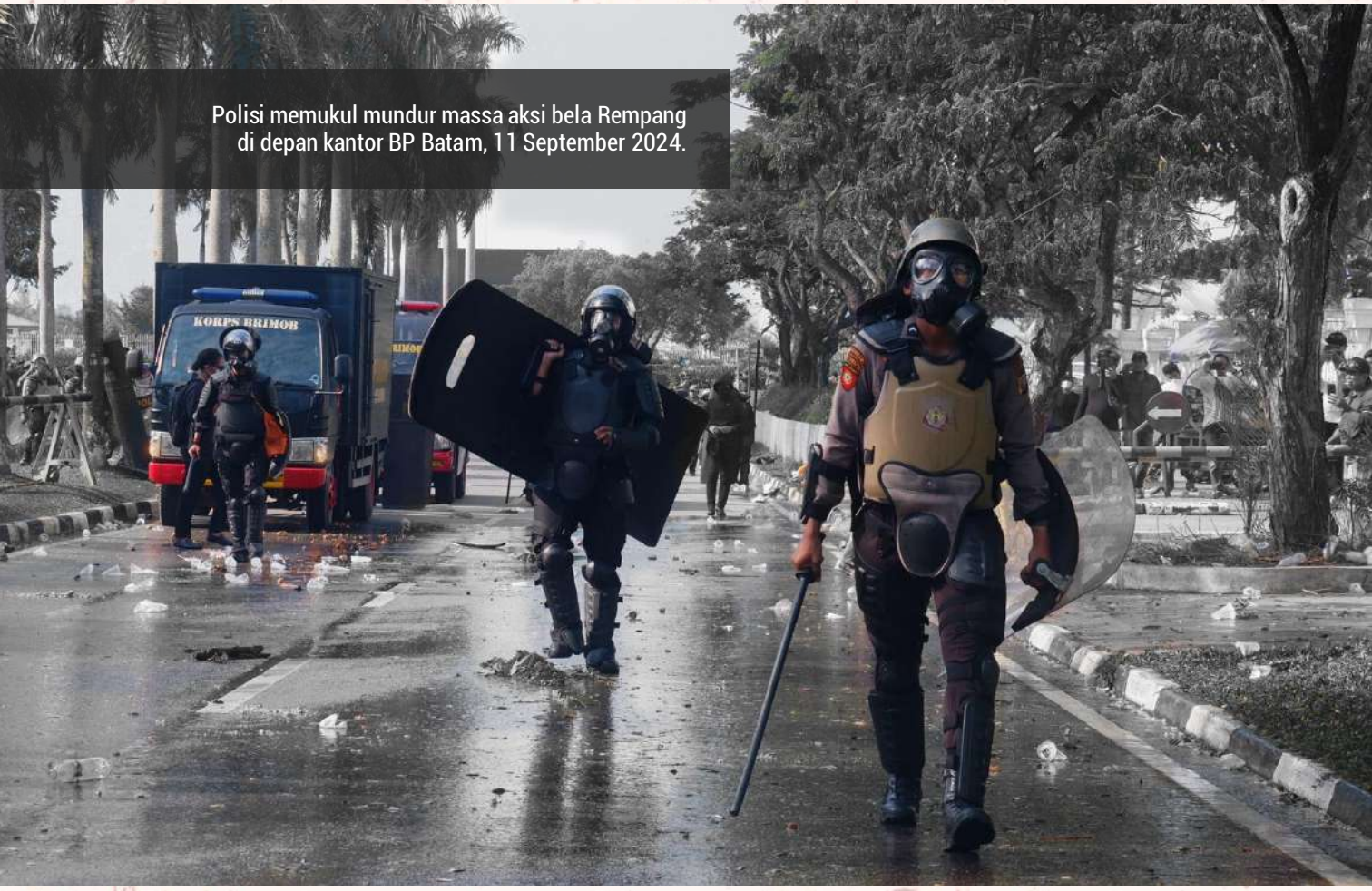

Polisi memukul mundur massa aksi bela Rempang di depan kantor BP Batam, 11 September 2024.

[14] Keadilan Timpang di Pulau Rempang, https://www.kontras.org/wp-content/uploads/2023/09/Final_Temuan_Awal_Investigasi_atas_Peristiwa_Kekerasan_dan_Pelanggaran_compressed-1.pdf, diakses 27 Juli 2024.

Seiring dengan rencana negara mengubah kawasan Rempang menjadi pusat transisi hijau global, warga Rempang mulai menyadari bahwa negara hadir dalam perampasan tanah tempat mereka tinggal. Intimidasi sebagai bentuk penundukan kekuasaan tampak dilakukan aparat negara terhadap masyarakat Rempang yang menolak penggusuran dari Juli hingga Agustus 2023. Intimidasi itu berupa surat pemanggilan dari Polres Barelang, Polda Kepri hingga Kejaksaan Agung dengan pasal melawan hukum karena menghambat investasi yang merugikan negara dan pendudukan lahan secara ilegal. Sampai puncak demonstrasi pada 'September Berdarah', polisi dan otoritas pemerintah memanggil orang yang diduga pengunjuk rasa, memeriksa ponsel mereka untuk mencari bukti yang memberatkan. Aparat juga menggeledah rumah, kehidupan kerja, dan urusan perpajakan mereka yang diduga sebagai otak dari peristiwa kelam itu. Ada banyak penangkapan. Setidaknya, terdapat penangkapan sewenang-wenang pada 8 warga, yang kemudian semuanya dinyatakan sebagai tersangka. Padahal, Pasal 66 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 secara jelas menyatakan setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Di lapangan, merujuk pada keterangan warga terdampak, sosialisasi proyek *Rempang Eco City* tidak pernah melibatkan dialog dua pihak dan secara berangsur-angsur menyisakan sebuah kesan bahwa masyarakat memang direncanakan untuk dipindahkan. Kebijakan relokasi seakan lebih bersifat seperti penggusuran lahan. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BP) Batam sekaligus Wali Kota Batam, Muhammad Rudi melegitimasi upaya relokasi paksa itu dengan alibi lahan kosong warga akan diserahkan pada PT MEG pada 28 September 2023. Pemerintah mengiming-imingi warga yang patuh pada kebijakan itu akan mendapatkan ganti lahan 500 meter persegi dan bangunan rumah tipe 45 senilai Rp 120 juta di lahan seluas 450 hektar di Pulau Galang. Akibat keterbatasan waktu dan nafsu mencairkan investasi, setuju atau tidak setuju, pemerintah menggunakan aparat untuk mengosongkan lahan 16 Kampung Melayu Tua di mana 7.500 penduduk Rempang menghadapi ancaman penggusuran.

Perempuan warga Rempang menyuarakan penolakan relokasi di Kampung Sembulang, Pulau Rempang, 7 Maret 2024.

Zubri (46), seorang warga Kampung Sembulang, salah satu informan, beranggapan bahwa warga kampung adat melayu tidak materialistis. Kampung, baginya, tak tergantikan. Ia menegaskan penolakan relokasi yang dilakukan pemerintah meskipun ada penundaan pengosongan lahan yang semula ditetapkan 28 September 2023, kini diundur hingga kurun waktu yang belum ditentukan. Pria paruh baya itu membeberkan beberapa muslihat pemerintah untuk meredam perlawanan warga.

Pertama, pemerintah menggunakan kata relokasi warga, tetapi sekarang menjadi digeser. Padahal intinya sama, kampung warga bakal hilang jika direlokasi maupun digeser. Kedua, trik pecah belah dengan mereduksi angka penggusuran agar warga tergiur untuk pindah. Namun, iming-iming yang diberikan pemerintah tak membuat warga luluh.

"Inilah yang namanya marwah. Rumah, tanah bisa mereka ganti, tapi marwah tak bisa mereka (pemerintah) ganti. Itu yang menurut saya tidak bisa mereka hitung-hitung di atas kertas bahwasannya Marwah Melayu itu tidak terbayarkan. Tidak ada nilai tawarnya oleh mereka," ungkap Zubir.

Pada kesempatan lain, ia juga mengatakan, "Bagi kami, rumah, tanah dan subsidi-subsidi itu tidak sebanding dengan nilai kampung kami yang ada ini. Artinya materi-materi itu tidak akan memberikan satu yang namanya ketenangan seperti yang kami alami kehidupan kami di kampung ini," katanya.

Konflik walhasil bergejolak. Warga yang merupakan warga asli (Suku Melayu, Orang Laut, dan Orang Darat) menolak direlokasi karena ikatan kuat pada kampungnya. Warga menuntut pembangunan proyek *Rempang Eco City* dilakukan tanpa penggusuran. Alasannya, relokasi akan menghapus identitas mereka sebagai orang Melayu pesisir. Apalagi, keberadaan kampung tua di Batam dan sekitarnya telah ada sejak lebih dari 188 tahun lalu, seiring dengan kejayaan Kerajaan Lingga, Kerajaan Riau, Kerajaan Johor, dan Kerajaan Pahang Malaya. Mereka khawatir, bila relokasi dilakukan, akan kehilangan sejarah dan identitas—tercerabut dari jejaring sosial yang ada, dan ketidakpastian untuk mengawali hidup di tempat yang baru.

"Bagaimana Anda bisa mengambil orang-orang dari 16 desa, dan menempatkan mereka di satu pulau kecil? Akan ada konflik atas tanah dan penangkapan ikan. Kita semua adalah nelayan," ujar salah seorang warga yang tidak setuju dengan penggusuran.

Pasca peristiwa bentrok 7 September 2023 lalu, mayoritas warga Pulau Rempang hidup dengan ketakutan dan tidak tenang. Catatan kami di lapangan menunjukkan banyak warga merasa terintimidasi dengan kedatangan petugas di kampungnya. Seperti kisah dua ibu paruh baya ini yang merasa tidak nyaman saat berada di luar dan khawatir tindak tanduknya akan diperhatikan aparat.

"Kampung ini mau direlokasi, masyarakat jadi macamnya kaget gitu. Apalagi tahu posisi (kena gusuran) langsung di tempat ibu. Jadi kesehatan (menurun), perasaan ibu udah jadi kayak mikir terus gitu. Mikirnya mau kerja pun nggak enak, mau kemana-mana pun nggak enak, mikirin ke depannya itu gimana." ujar Suminem (46) yang bercerita sembari menekankan persoalannya itu juga terjadi pada suaminya yang berprofesi sebagai nelayan.

"Kami tidak membayangkan itu sama sekali (rumah direlokasi pemerintah). Dalam keadaan ini kami ketakutan. Ibu merasakan takut, setiap malam tidak pernah tentram. Ibu takut suatu saat orang itu (aparat) datang dan menggusur. Jadi, kami tak punya apa-apa lagi. Itu ibu rasakan siang malam, ibu tidak merasa tentram karena masalah ini. Siang malam itu tak tenang rasanya. Memang kepikiran terus. Ibu selalu menangis. Kalau aku pindah ke tempat lain, tidak senyaman tempat aku walaupun tempat ini buruk. Rumah aku ini tidak sebagus yang lain, tapi rasanya nyaman di tempat sendiri. Kami hidup di sini bukan puluhan tahun lagi. Dari datuk, nenek moyang, itu sudah ratusan tahun tinggal di sini," ucap Rahimah (53) seraya menyeka air mata yang menetes di wajahnya.

Kontak kami juga menyampaikan bahwa mereka enggan datang ke posko relokasi karena khawatir kedatangannya diartikan sebagai bentuk persetujuan relokasi walaupun tidak melakukan penandatanganan.

Data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) selama lima tahun terakhir (2018-2022) menunjukkan setidaknya terdapat 301 kasus perampasan tanah, yang menyebabkan sekitar 8,5 juta hektare wilayah masyarakat adat terampas. AMAN mencatat konflik akibat PSN seperti proyek *food estate* di Papua Barat dan Kalimantan Tengah, pembangunan Waduk Lambo di Nagekeo NTT, Geothermal di Manggarai NTT, hingga proyek Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur merupakan konflik agraria yang merugikan masyarakat adat.[15] Fenomena yang sama juga terjadi di Rempang. Adanya eskalasi konflik agraria dalam konteks Rempang mengindikasikan bahwa negara gagal menjamin hak hidup rakyatnya dan membiarkan kekerasan terjadi kepada rakyatnya. Negara dalam hal ini menggunakan kontrolnya terhadap tanah untuk memberikan konsesi kepada korporasi. Bila hal ini terjadi terus menerus, artinya negara menjadi penjajah bagi rakyatnya sendiri di bawah bayang-bayang ketidakadilan transisi energi hijau.

Perempuan warga Rempang terus menyuarakan penolakan relokasi dan PSN Rempang Eco City, 18 Juli 2024.

[15] Rilis Walhi dan Aman: Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City: Strategis Untuk Siapa?, 20 September 2023.

PSN Kilat dan Upaya Sembunyi di Negara Suaka Pajak

Tidak ada yang namanya makan siang gratis. Imbalan dari investasi besar-besaran itu menjanjikan Xinyi International Investment Limited hak atas tanah di Rempang sebagai bagian dari kesepakatan.

Cerita ini dimulai pada tahun 2004 di mana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batam memberikan izin kepada PT Makmur Elok Graha (PT MEG)—perusahaan terafiliasi dengan korporasi Artha Graha milik Tommy Winata—untuk mengembangkan Rempang. Sektor energi terbarukan menjadi target utama operasi bisnis perusahaan raksasa dari Tiongkok ini, terutama di bidang kaca panel surya. Xinyi berkolaborasi dengan Artha Graha dengan dukungan penuh dari Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BP) Batam.

Pembagian konsesi lantas dilakukan untuk mengakselerasi pembangunan Eco City di mana BP Batam memberikan hak konsesi pengelolaan ke PT MEG sebesar 7.572 hektare atau 45,89 persen dari total luas Pulau Rempang. Dari luas itu, 2.000 hektare diperuntukan untuk investor.

Di tingkat tapak, pemahaman mengenai pemanfaatan lahan pada *Rempang Eco City* saat itu hanya berkisar pada pembangunan zona pariwisata seluas lima ribu hektare. Namun kini, selain akan dibangun industri manufaktur panel surya raksasa dari China—berkat pemberlakuan Proyek Strategis Nasional—bayangan futuristik Rempang juga akan diwarnai oleh kawasan industri, jasa, dan pariwisata.

Ketidakselarasan pemahaman antara warga mengenai pembangunan PSN di Rempang beralasan karena konteks regulasinya tumpang tindih dan ugal-ugalan.

Pertama, tidak ada alokasi ruang untuk proyek pembangunan *Rempang Eco City* di Pulau Rempang bila merujuk pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021. Justru, Pulau Rempang termasuk Taman Buru Pulau Rempang masuk dalam rencana pengembangan kawasan industri perikanan, pariwisata daerah, dan kawasan lindung nasional sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang diatur lewat Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017.

Kedua, proyek *Rempang Eco City* tidak pernah tercatat pada daftar PSN yang dirilis melalui Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 maupun peraturan sebelumnya, alih-alih dirilis paksa pada Permenko Perekonomian No. 7 Tahun 2023 tentang PSN. Tujuannya jelas untuk mendapatkan status urgensi tinggi agar direalisasikan dalam waktu yang singkat agar agar seluruh PSN di Indonesia dapat diselesaikan pada Semester 1 tahun 2024, mengacu pada pertanyaan Presiden Jokowi Widodo.[16]

[16] Presiden Jokowi instruksikan seluruh PSN selesai pada semester pertama tahun 2024, artikel mengenai instruksi presiden merujuk pemberitaan https://www.antaranews.com/berita/3758556/bahlil-jokowi-minta-psn-selesai-di-semester-pertama-2024

Tabel 4.
Perubahan Proyek Strategis Nasional Dari Tahun 2016-2024

No	Peraturan	Tahun	Jumlah Proyek	Jumlah Program	Total PSN	Nilai (Rp. Triliun)
1	Perpres No. 3/2016	2016	225	1	226	2.631,00
2	Perpres No. 58/2017	2017	245	1	246	4.417,60
3	Perpres No. 56/2017	2018	223	3	226	4.150,00
4	Perpres No. 109/2020	2020	201	10	211	4.817,70
5	Permenko Perekonomian No. 7/2021	2021	208	10	218	5,698.50
6	Permenko Perekonomian No. 21/2022	2022	210	12	222	5.746,40
7	Permenko Perekonomian No. 9/2022	2022	200	12	212	5.481,40
8	Permenko Perekonomian No. 7/2023	2023	211	13	224	5.746,70
9	Permenko Perekonomian No. 8/2023	2023	204	13	217	5.918,86
10	Permenko Perekonomian No. 6/2024	2024	218	15	233	6.246,70

Sumber: Laporan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Semester II Tahun 2023[17] *dan Kemenko Perekonomian*[18]*.*

Peraturan tentang PSN mengalami sembilan kali perubahan sejak kali pertama pada 2016 hingga perubahan pada 2024. Proyek *Rempang Eco City* dimasukkan sebagai PSN oleh pemerintah dalam Peraturan Kementerian Koordinator Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 yang ditandatangani pada 8 Agustus 2023. Hanya berselang satu bulan setelah *Rempang Eco City* masuk PSN, tepatnya 7 September 2023, warga di Rempang terkena penggusuran dengan pengerahan aparat secara eksesif. Terdapat penembakan gas air mata ke warga dan anak-anak di kampung-kampung di Rempang. Hal ini menunjukkan proyek PSN kontroversial dan tidak transparan karena mengabaikan hak-hak warga.

[17] Laporan KPPIP Semester II 2023, https://kppip.go.id/wp-content/uploads/filebase/laporan_semester_kppip/Laporan-KPPIP-2023-semester-02.pdf, diakses 9 September 2024.

[18] Menko Airlangga: Dorong Tingkat Pembangunan Nasional Lebih Tinggi, Pemerintah Akselerasi Kebijakan Satu Peta Serta Kembangkan PSN dan KEK, https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5882/menko-airlangga-dorong-tingkat-pembangunan-nasional-lebih-tinggi-pemerintah-akselerasi-kebijakan-satu-peta-serta-kembangkan-psn-dan-kek, diakses 9 September 2024

Sebagai informasi, pembangunan proyek-proyek PSN ditargetkan rampung bersamaan dengan selesainya jabatan presiden. Sebab PSN merupakan label bagi proyek-proyek yang dianggap penting bagi pemerintah. Sifat PSN tersebut memunculkan ekses negatif terhadap munculnya PSN secara kilat melalui peraturan terbaru dalam Permenko Perekonomian 6/2024 yang diumumkan pada Maret 2024[19], menjelang periode Presiden Joko Widodo berakhir pada 20 Oktober 2024 atau berselang tujuh bulan.

Setidaknya ada dua PSN baru sesuai Permenko Perekonomian 6/2024 yang kontroversial yaitu proyek pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland senilai Rp 65 triliun dan kawasan pengembangan terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) senilai Rp 18,54 triliun. Lokasi kedua PSN ini berada di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dengan penanggung jawab adalah Menteri Pariwisata.[20] Keduanya dianggap kontroversi karena aroma nepotisme yang kuat di mana ada indikasi balas jasa politik terkait dukungan pengusaha pemilik kedua proyek ke Ibu Kota Nusantara (IKN).[21] Diketahui bahwa penerima manfaat PIK 2 adalah Sugianto "Aguan" Kusuma melalui Agung Sedayu Group dan Anthony Salim melalui Salim Group dan pemilik BSD adalah Eka Widjaya yang diteruskan anak-anaknya melalui Sinar Mas Group.[22] Kedua pengusaha ini dianggap "berjasa" kepada pemerintah dengan mengucurkan dana untuk investasi proyek IKN yang selama ini sepi peminat investasi meskipun ada banyak komitmen investasi.

Ketiga, ada indikasi korupsi terkait proyek Kawasan Wisata Terpadu Eksekutif (KWTE) pada 2004 silam. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menyetujui PT. Makmur Elok Graha (MEG) menjadi pemegang konsesi pengembangan lahan di Pulau Rempang yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Nota Kesepahaman (MoU) Nomor 65 yang ditandatangani oleh Nyat Kadir, saat itu menjabat sebagai Walikota Batam, dan Benyamin Balukh, yang kala itu menjabat sebagai Deputi Operasi Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (Otorita Batam yang kini menjadi BP Batam).

Nota kesepahaman tersebut mengatur pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) dengan kuasa konsesi selama 30 tahun yang bisa diperpanjang hingga 80 tahun untuk kawasan seluas 17.000 hektare serta kawasan penyangganya. MoU yang mewajibkan PT MEG menyusun rencana pengembangan kawasan untuk proyek KWTE tidak terealisasi dan diduga mengakibatkan kerugian negara senilai Rp 3,6 triliun. Hingga hari ini belum ada kelanjutan proses hukum yang diputuskan untuk kasus dugaan korupsi KWTE Pulau Rempang.[23]

---

19 Pemerintah Beberkan Alasan PIK 2 dan BSD Masuk Daftar PSN, https://money.kompas.com/read/2024/03/28/093000226/pemerintah-beberkan-alasan-pik-2-dan-bsd-masuk-daftar-psn, diakses 9 September 2024.

20 Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) Permenko 6/2024, https://www.scribd.com/document/741567875/240514-Rekapitulasi-Permenko-6-2024, diakses 9 September 2024.

21 PIK dan BSD Jadi PSN, Pengamat: Politik Balas Budi Jokowi ke Investor IKN, https://www.metrotvnews.com/read/bmRCeEMn-pik-dan-bsd-jadi-psn-pengamat-politik-balas-budi-jokowi-ke-investor-ikn, diakses 9 September 2024.

22 Profil Aguan dan Eka Tjipta Widjaja, Pemilik PIK dan BSD yang Masuk PSN Jokowi, https://bisnis.tempo.co/read/1851248/profil-aguan-dan-eka-tjipta-widjaja-pemilik-pik-dan-bsd-yang-masuk-psn-jokowi?page_num=2, diakses 9 September 2024.

23 *Pulau Rempang, Eco City, dan Konflik Agraria*, https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/pulau-rempang-eco-city-dan-konflik-agraria, diakses 29 September 2023.

Meskipun terindikasi korupsi, waktu 19 tahun tidak menyusutkan ambisi negara dalam membangun *Rempang Eco City* yang dilabeli dengan wacana transisi energi.

Di bawah payung hukum yang lebih kuat, PSN *Rempang Eco City* dapat mencaplok lahan seluas 17.000 hektar yang merupakan kawasan hutan dan 600 hektar lainnya yang merupakan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dari BP Batam (yang telah dicadangkan sebagai Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT MEG). Izin ini absah karena dinyatakan langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto (saat ini Hadi menjabat Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM), bahwa lahan tinggal di Pulau Rempang tidak memiliki sertifikat karena statusnya di bawah pengelolaan Otorita Batam.

Unjuk Rasa Warga Rempang Menolak Relokasi & PSN Rempang Eco City.

Mengelabui Kepemilikan dengan Perusahaan Cangkang

Tomy Winata diduga kuat merupakan pihak di balik pengembangan Rempang menjadi kawasan industri melalui PT Makmur Elok Graha (MEG). Namun anehnya, nama dia sama sekali tidak ada di jajaran pengurus perusahaan, pemegang saham, dan pihak yang melakukan berbagai perjanjian dengan investor.

Hasil penelusuran kami menunjukkan bahwa penerima manfaat sesungguhnya (*Ultimate Beneficial Ownership*) dari PT MEG diduga kuat adalah karyawan PT MEG itu sendiri.

Berdasarkan data profil perusahaan PT MEG, pemilik akhir sahamnya adalah Grideye Resources Limited (yang terdaftar di British Virgin Island, sebuah negara suaka pajak di Karibia). Grideye Resources Ltd berdiri pada 9 Mei 2013.

Grideye punya anak perusahaan dengan kepemilikan 100%, yaitu Banyan Solution Enterprise Pte Limited, terdaftar di Singapura. Banyan memiliki 40% saham di PT Wisesa Makmur Raya, sedangkan 60% saham lainnya dikuasai perorangan. Kemudian PT Wisesa punya saham 75% di PT MEG dan 25% adalah milik PT Inti Bahana Indah Semesta. Baik pemilik saham perorangan di PT Wisesa maupun PT Inti Bahana adalah orang yang kegiatannya terafiliasi dengan Artha Graha.

Sekretaris Banyan Solution Enterprise adalah Lok Teng Teng Dorothy, seorang warga Singapura. Nama sekretaris ini terdapat juga dalam database Offshore Leaks dari International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ).[24] Dorothy berperan sebagai direktur dan pemegang saham sejumlah perusahaan berbasis di Singapura dan British Virgin Islands (BVI). Database ICIJ ini mengungkap aktivitas keuangan di negara-negara suaka pajak terkait dengan dugaan kejahatan ekonomi berupa menyembunyikan kekayaan untuk menghindari pajak.[25]

Data Grideye Resources Ltd yang diakses pada September 2023 melalui Financial Service Commission British Virgin Islands menunjukkan bahwa terdapat Direktur Individu tunggal bernama Michael Wilson. Berdasarkan situs resmi PT MEG, [26] terdapat karyawan dengan nama Michael Wilson sebagai Head of Business Development and Strategic Partnership yang diduga kuat adalah orang yang sama dengan Direktur Individu Grideye Resources Limited berbasis di BVI, negara suaka pajak. Nama Michael Wilson di dalam website PT MEG sudah tidak ada setelah website mengalami perubahan saat alamat website yang menunjukkan namanya diakses pada 3 September 2024.

---

[24] Database Offshore Leaks, https://offshoreleaks.icij.org/nodes/75060, diakses 2 September 2024.

[25] Criminals and oligarchs are hiding wealth in secretive Dutch foundations, new investigation finds, https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/criminals-and-oligarchs-are-hiding-wealth-in-secretive-dutch-foundations-new-investigation-finds/, diakses 2 September 2024.

[26] Manajemen PT Makmur Elok Graha, https://makmurelokgraha.co.id/management/, diakses pada 23 Juli 2024.

Gambar 1.
Data Direktur Grideye Resources Limited (Ltd)

BVI FINANCIAL SERVICES COMMISSION **LIST OF DIRECTORS**

Company No. : 1773526
Company Name : Grideye Resources Ltd

Filing Date : 06/04/2023

INDIVIDUAL DIRECTORS

S/No.	Name	Director Type
1	MICHAEL WILSON	Director

Sumber: Financial Service Commission British Virgin Islands, diakses 9 September 2023.

Gambar 2.
Manajemen PT Makmur Elok Graha Sebelum Perubahan Website

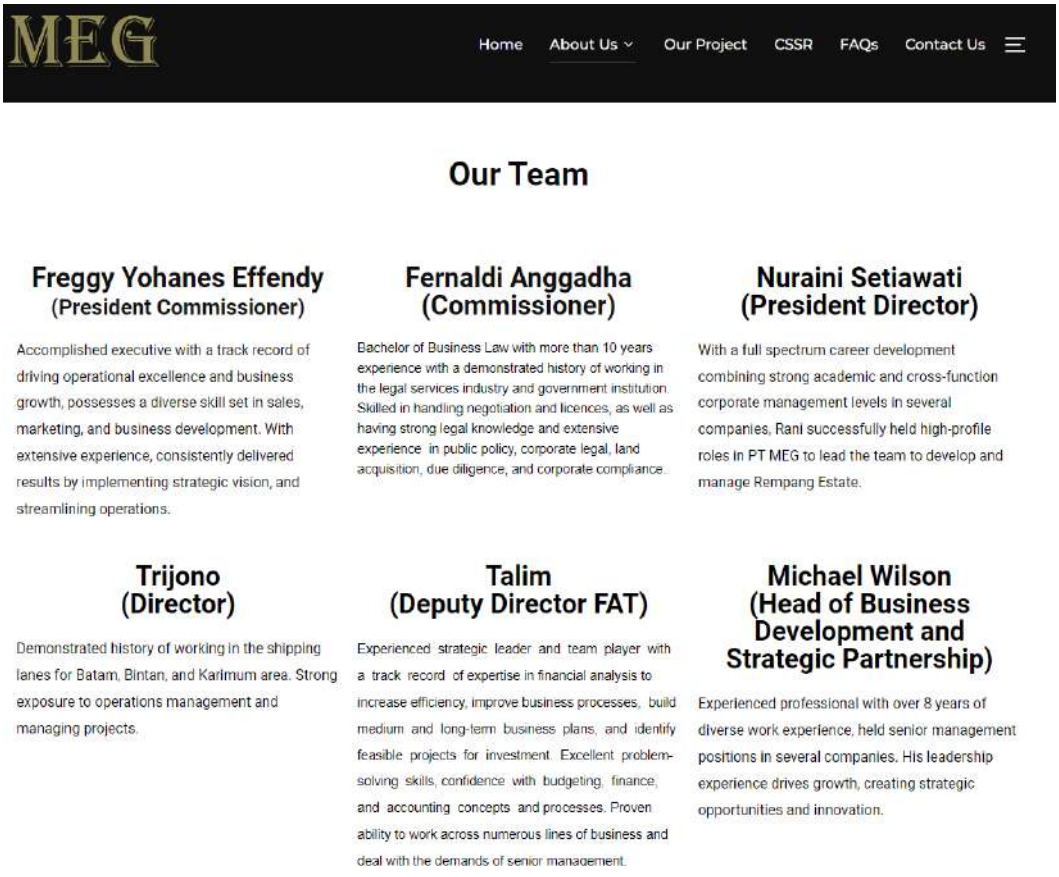

***Sumber**: Website resmi PT Makmur Elok Graha, https://makmurelokgraha.co.id/management/, diakses 23 Juli 2024.*

Gambar 3.
Manajemen PT Makmur Elok Graha Setelah Perubahan Website

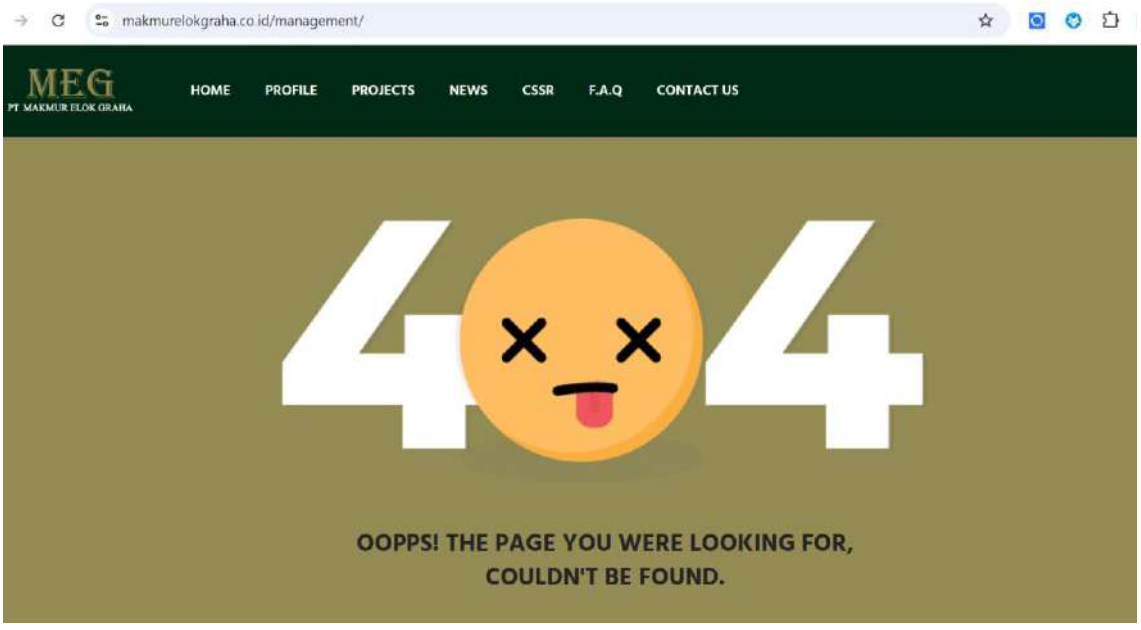

***Sumber**: Website resmi PT Makmur Elok Graha, https://makmurelokgraha.co.id/management/, diakses 3 September 2024.*

Sejak berdiri pada tahun 2013 dengan modal saham USD 50.000, Grideye tidak menunjukkan aktivitas yang berarti. Direksi Grideye hanya diganti sekali pada 6 April 2023 setelah direksi pertama terdaftar pada 26 Agustus 2016. Satu-satunya kegiatan lainnya adalah pembayaran iuran tahunan perusahaan ke otoritas BVI sejak 2013 hingga 2023. Dengan tingkat aktivitas yang minim seperti itu, Grideye, yang memiliki saham di PT MEG, diduga sebagai perusahaan cangkang (*shell company*).

British Virgin Island (BVI) dikenal luas karena kerap kali menjadi tujuan utama bagi individu yang berniat untuk menyembunyikan jejak kepemilikan perusahaan. Perusahaan yang terdaftar di BVI memiliki rekam jejak keterlibatan dalam kasus korupsi terbanyak dibandingkan dengan negara United Kingdom Overseas Territories lainnya.[27] Kemudian, BVI juga dikenal sebagai negara suaka pajak. Tax Justice Network menempatkan BVI sebagai yurisdiksi nomor 1 yang memfasilitasi perusahaan multinasional untuk membayar pajak lebih rendah dan menyebabkan kehilangan potensi pajak (*tax loss*) bagi negara lainnya setiap tahun hingga sebesar 11 triliun USD. [28]

---

[27] Transparency International UK. (2018). *The Cost of Secrecy: The role played by companies registered in the UK's Overseas Territories in money laundering and corruption*. Diakses melalui https://www.transparency.org.uk/sites/default/files/pdf/publications/TIUK-CostofSecrecy-WEB-v2.pdf

[28] Tax Justice Network. (2021). *British Virgin Islands*. Diakses melalui https://taxjustice.net/country-profiles/british-virgin-islands/

Temuan struktur perusahaan yang berakhir di negara suaka pajak menunjukkan bahwa penerima manfaat sesungguhnya PT MEG adalah manajemen PT MEG itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi sebuah upaya yang diduga berusaha menyembunyikan pemilik asli perusahaan di negara suaka pajak. Merujuk temuan-temuan International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ), [29] perusahaan cangkang luar negeri yang diungkap dari skandal Panama Paper hingga Paradise Paper, dimanfaatkan dalam transaksi keuangan yang meragukan termasuk penghapusan sanksi, penghindaran pajak, dan korupsi publik.

Sementara itu, Tomy Winata yang disebut-sebut berada di balik pengembangan Rempang melalui PT MEG tidak pernah ada catatan namanya sejak PT MEG didirikan pada 2003, berdasar profil perusahaan di pangkalan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM.

Meskipun demikian, foto-foto Tomy Winata dalam berbagai momentum kerjasama PT MEG dan keberadaan salah satu anaknya, Adithya Prakarsa Winata, menunjukkan bukti kuat keterlibatan keluarga Tomy.

Rumah relokasi warga terdampak PSN Rempang Eco City, 18 Juli 2024.

[29] US poised to crack down on anonymous shell companies, https://www.icij.org/investigations/paradise-papers/us-poised-to-crack-down-on-anonymous-shell-companies/, diakses pada 23 Juli 2024.

Secara kronologis keterlibatan Tomy Winata dalam pengembangan Rempang dapat dilihat dari foto-foto berikut yang merepresentasikan momen krusial dalam kerjasama PT MEG.

1. Pada 26 Agustus 2004 Tomy Winata hadir dan melakukan tanda tangan dalam perjanjian Pelaksanaan Pengembangan & Pengelolaan Kawasan Rempang (17.000 hektare), Pulau Setokok (200 hektare), dan Pulau Galang (300 hektare). Penandatanganan perjanjian kerjasama berlangsung antara Pemkot Batam, [30] Otorita Batam, [31] dan PT MEG. [32]

Gambar 4.
Foto-foto MoU dan MoA PT Makmur Elok Graha dengan Pemkot Batam dan Otorita Batam

[30] Awal Mula Investasi di Pulau Rempang Dimulai Era Nyat Kadir pada 2004, https://gokepri.com/awal-mula-investasi-di-pulau-rempang-dimulai-era-nyat-kadir-pada-2004/, diakses 9 September 2024.

[31] Latar Belakang Investasi Pulau Rempang, Sudah Ada Sejak Tahun 2004, https://ariranews.com/24/08/2023/latar-belakang-investasi-pulau-rempang-sudah-ada-sejak-tahun-2004/, diakses 9 September 2024.

[32] Tahun 2004 Silam, PT MEG Terpilih Kelola Pulau Rempang, https://www.pelitatoday.com/2023/08/tahun-2004-silam-pt-meg-terpilih-kelola.html#google_vignette, diakses 9 September 2024.

Penandatanganan Akta MoU & Akta MoA
di Hadapan Notaris Imranengsih, SH
Pengganti dari Notaris Hurhayati Suryasumirat, SH
26 Agutus 2004

***Sumber**:Pelitatoday, Gokepri, dan Ariranews.*

Suku Darat Pulau Rempang,
11 September 2023.

2. Pada Juli 2023, Tomy hadir dalam penandatanganan kerjasama berupa Memorandum of Agreement (MoA) antara PT MEG dengan Xinyi International Investment Limited di Chengdu, China. Pada saat yang sama, Xinyi juga menjalin Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk kerjasama investasi.[33] Tomy juga tampak bersama Kepala BKPM, Bahlil (saat ini Menteri ESDM), dalam kunjungan ke Xinyi pada 19 Juli 2023.

Gambar 5.
Pertemuan Tomy Winata bersama Xinyi dan Menteri Investasi

Keterangan: Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia (empat dari kanan) bersama Tomy Winata (dua dari kiri) di pabrik Xinyi, China, 19 Juli 2023.[34]

---

33 President Jokowi witnessed the signing of the cooperation agreement on Rempang Island Photovoltaic Industrial Park, with a total investment of 11.6 billion US dollars!
(佐科总统见证 Rempang 岛光伏工业园合作协议签署，总投资达116 亿美元!),
https://mp.weixin.qq.com/s/Ytl7z2udMpZs3AYEgOYLeA,
diakses pada 31 Juli 2023.

34 IDN Times, https://www.idntimes.com/business/economy/ridwan-aji-pitoko-1/peran-tomy-winata-di-proyek-rempang-eco-city?page=all, diakses pada 23 Juli 2024.

Gambar 6.
Penandatanganan MoU PT Makmur Elok Graha bersama Xinyi

Keterangan: Tomy Winata (lima dari kanan) hadir dalam penandatanganan MoA antara PT MEG dengan Xinyi. Hadir juga Presiden Joko Widodo, Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, dan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Panjaitan, di Chengdu, China, 28 Juli 2023.

Sumber: Guide To Living in Indonesia (印尼生活指南).

Pabrik Kaca Xinyi di China.
Sumber Foto : metro.com

3. Pada 28 Juli 2023, dalam acara penandatangan kerjasama antara PT MEG dengan Xinyi tersebut dilakukan oleh Adithya Prakarsa Winata, anak Tomy Winata. Keberadaan putra Tomy [35] ini menjadi sinyal yang jelas bahwa ada Tomy dalam proyek pengembangan Rempang. Meskipun nama Adithya tidak tercantum sebagai direksi PT MEG, tetapi dia telah hadir menandatangani kesepakatan MoA mewakili PT MEG dan mulai bicara prospek bisnis di Rempang dengan komunitas pengusaha muda yaitu Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi).

Gambar 7.
Penandatanganan Mou PT Makmur Elok Graha bersama Xinyi
Disaksikan Presiden Jokowi dan Menteri Investasi

Keterangan: Penandatanganan MoA antara PT MEG diwakili oleh Adithya Prakarsa Winata (anak Tomy Winata–memegang dokumen di sebelah kiri) dengan perwakilan Xinyi, 28 Juli 2023. Disaksikan oleh Presiden Joko Widodo dan Bahlil Lahadalia.

***Sumber**: Guide To Living in Indonesia (印尼生活指南).*

[35] Adithya Prakarsa Winata merupakan anak Tomy Winata. Adithya juga terlibat dalam proyek pelabuhan untuk gas Masela di Maluku. Baca wawancara "Adithya Prakarsa Winata, putra Tomy Winata: Infrastruktur di Tual Sudah Siap", Majalah Tempo edisi 16 November 2019, https://majalah.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/158783/adithya-prakarsa-winata-putra-tomy-winata-infrastruktur-di-tual-sudah-siap, diakses pada 23 Juli 2024.

Gambar 8.
Foto Adithya Prakarsa Winata [36]

[36] Adithya Winata sebagai Komisaris Kaja Group, https://kaja-group.com/id/tentang-kami/, diakses 23 Juli 2024.

Gambar 9.
Adithya Prakarsa Winata Diskusi Tentang Rempang [37]

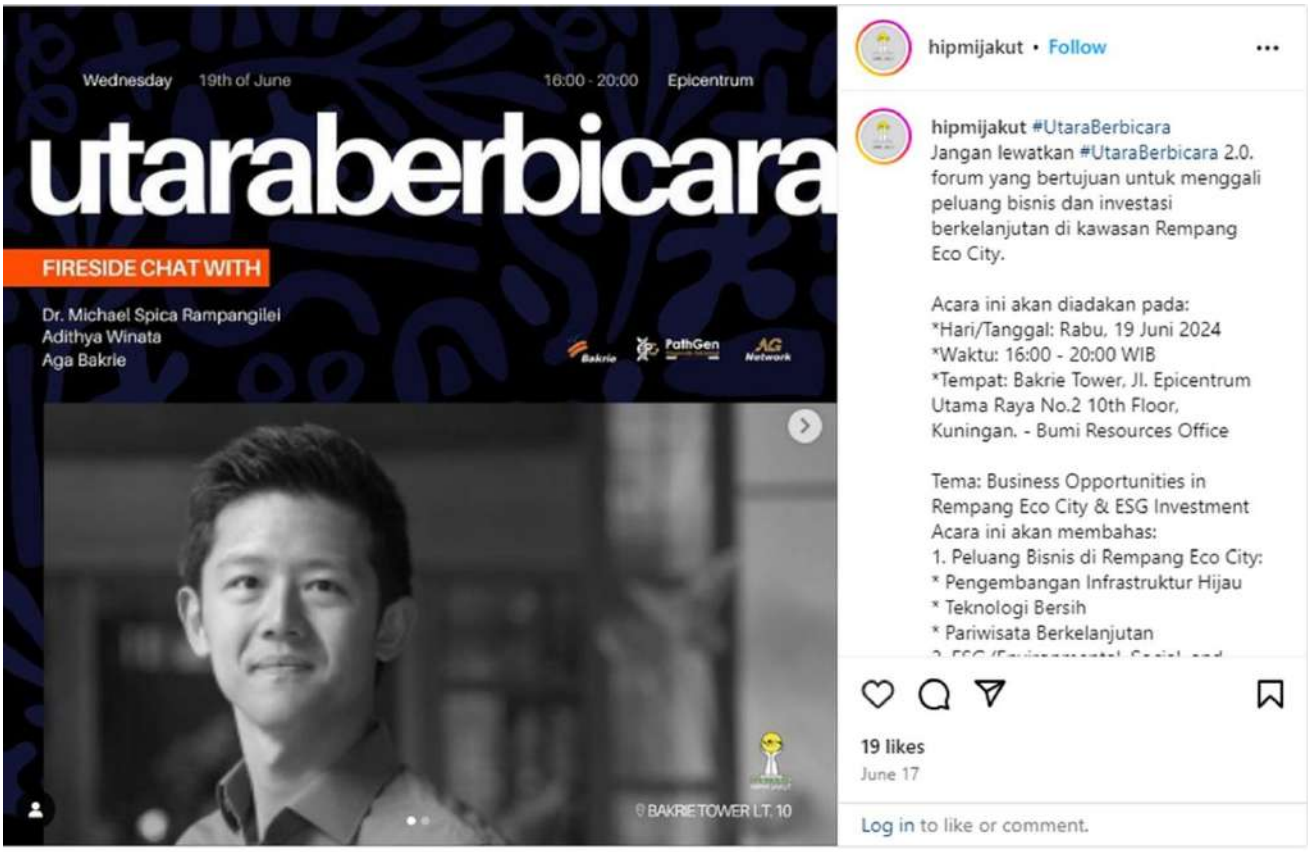

Peran Tomy yang jelas dan nama dia yang tidak tercatat dalam dokumen-dokumen administrasi perusahaan ini seolah bertentangan.

Pada satu sisi, dia memiliki pengaruh yang besar melalui anak buah di PT MEG yang terafiliasi dengan Artha Graha dan anaknya membuatnya terhindar dari tanggung jawab korporasi secara tertulis. Pada sisi lain, nama dia yang tidak tercantum, seolah membuatnya leluasa bergerak dalam momentum perjanjian perusahaan. Praktik ini dapat diduga bagian dari upaya untuk menghindari pertanggungjawaban bila kemudian hari bermasalah secara hukum dan membersihkan reputasinya dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan perusahaan. Dia juga dapat diduga lepas dari tanggung jawab terhadap tuntutan di kemudian hari.

[37] Utaraberbicara, Hipmi Jakarta Utara, 19 Juni 2024, https://www.instagram.com/p/C8UUPtPy4Cp/?igsh=ZTloaWF0M2x2b3Rp&img_index=1, diakses 23 Juli 2024.

26 Agustus 2004

Tomy Winata hadiri Penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Pengembangan & Pengelolaan Kawasan Rempang (17.000 Ha), Pulau Setokok (200 Ha), dan Pulau Galang (300 Ha).

Penandatanganan perjanjian kerjasama berlangsung antara Pemkot Batam, Otorita Batam, & PT MEG.

19 Juli 2023

Tomy Winata hadiri penandatanganan *Memorandum of Agreement* (MoA) antara PT MEG dengan Xinyi International Investment Limited di Chengdu, China.

Xinyi menjalin *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk kerjasama investasi diwakili Bahlil Lahadalia.

Tomy & Bahlil kunjungi pabrik kaca Xinyi di Chengdu, China.

28 Juli 2023

Walaupun Adithya Prakarsa Winata (anak Tomy Winata) tidak tercantum sebagai direksi PT MEG, dia menghadiri & mewakili PT MEG dalam penandatanganan kerjasama PT MEG & Xinyi mengenai Proyek Pengembangan Rempang.

Adithya bicara prospek bisnis di Rempang dengan HIMPI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia).

Gambar 10.
Pemegang Saham dan Struktur Perusahaan PT Makmur Elok Graha

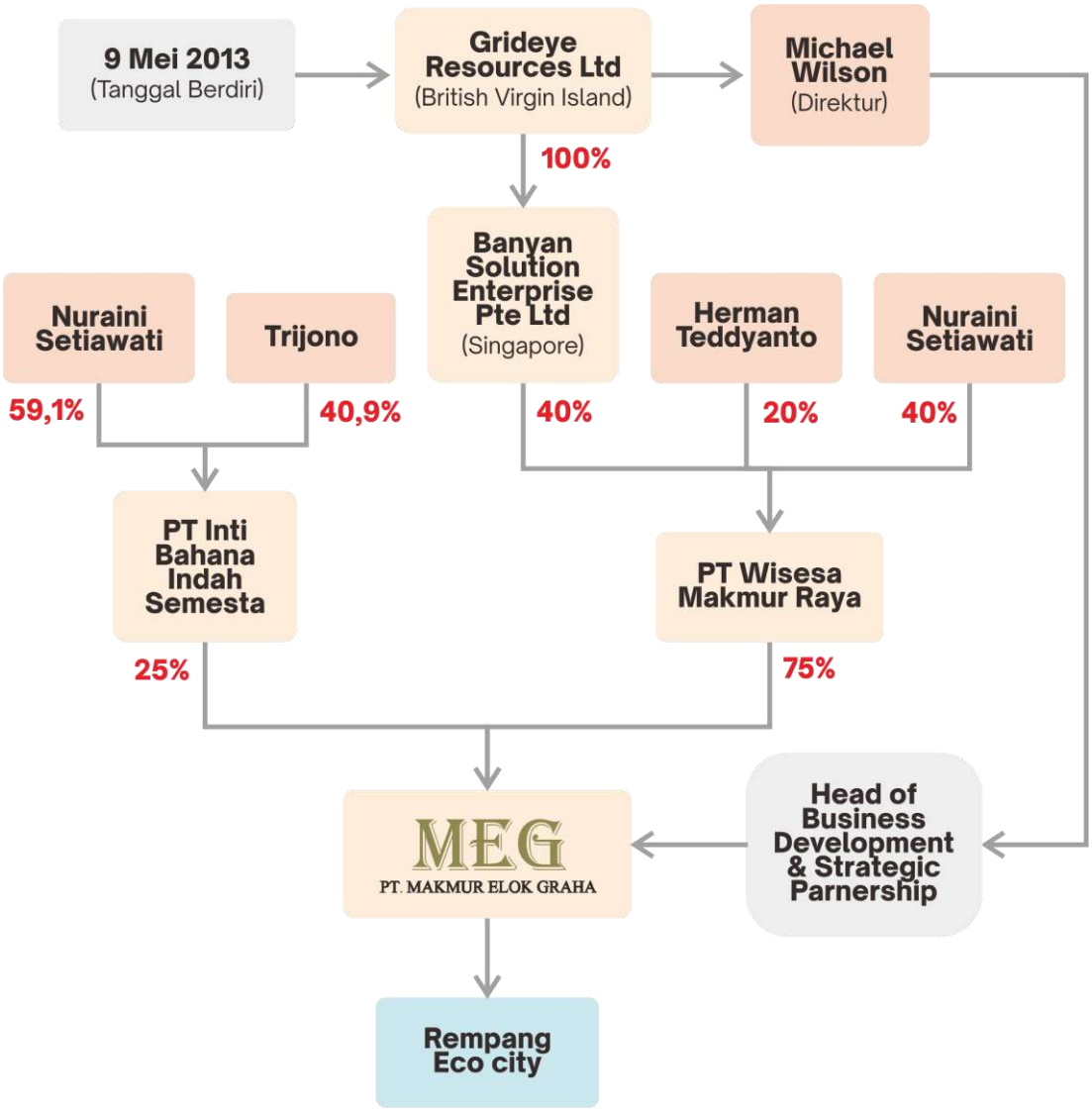

Sumber: *Ditjen AHU Kemenkumham (Diakses 8/09/2023), ACRA Singapore (Diakses 8/09/2023), BVI Financial Services Commission (Diakses 12/09/2023)) dan Website PT Makmur Elok Graha (23/07/2024)*

Tomy Winata sebagai pialang bisnis dari Artha Graha, memiliki rekam jejak berkolusi dengan militer dan perusahaannya dikenal sebagai 'rumah uang'. Kini karena koneksinya ia punya imperium bisnis. Dalam pemberitaan lain, Tomy Winata dan Sugianto Kusuma, bos Agung Sedayu Group, disebutkan pernah menjadi direktur Well Treasure Limited di Panama. Modal Well Treasure Limited mencapai USD 50.000, jumlah yang sama dengan Grideye Resources.

Tabel 5.
Profil Grideye Resources Limited (Ltd),
Perusahaan Induk PT Makmur Elok Graha

Kategori	Keterangan
Nama Perusahaan	Grideye Resources Limited
Nomor Perusahaan	1773526
Tanggal Berdiri	9 Mei 2013
Status Perusahaan	Aktif
Modal/Saham	USD 50.000
Alamat Perusahaan	Vanterpool PLaza, 2nd Floor P.O. Box 873 Road Town, Tortola, British Virgin Islands, VG1110
Agen Registrasi Perusahaan	ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN (BVI) TRUST LIMITED
Alamat Agen Perusahaan	Tortola Pier Park, Building 1, Second Floor Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands VG1110
Nomor Telepon Agen	284-494-5959
Nomor Fax Agen	284-494-5880

***Sumber**: British Virgin Islands Financial Services Commission, Registry of Corporate Affairs (Diakses 19 September 2023)*

Kawasan Pulau Rempang, 19 Maret 2024.

Dugaan konflik kepentingan dan kroni dalam kongsi dagang energi semakin menguatkan dugaan tindak koruptif telah mewarnai proyek PSN Rempang Eco City. Tangan-tangan tidak terlihat dari sekelompok oligarki yang bekerja sama dengan entitas asing untuk berusaha mengorkestrasi penguasaan lahan di Pulau Rempang tampak menjadi nyata jika menilik kenyataan di lapangan.

Dimulai dari upaya lobi agar PT MEG memperoleh hak konsesi atas 17.000 hektare di Pulau Rempang, pengembangan proyek KTWE Rempang, yang kemudian "diperbarui" dengan proyek *Rempang Eco City* yang dalam perkembangannya memperoleh status PSN di tahun 2023. Kecurigaan pada *Rempang Eco City* yang sarat akan konflik kepentingan, di mana pelibatan pejabat pemerintah dan orang dekatnya (atau *Politically Exposed Persons*/PEPs)[38] sangat masif dalam rantai pasok transisi energi, turut mendasari konflik vertikal antara masyarakat dan negara di Pulau Rempang.

Kronologi perkembangan proyek PSN *Rempang Eco City* yang terkesan tergesa-gesa dan tidak transparan semakin menguatkan ada kelambu dalam integritas pembangunan kita, salah satunya yang mewarnai implementasi proyek ini. Tata kelola yang buruk dari PSN ini juga menjadi saksi bisu terus mencuatnya konflik agraria, isu ketenagakerjaan, hingga kerusakan ekologis dan sumber daya alam dalam satu waktu.

Tetua warga Rempang berziarah ke makam tua yang terdapat di Kampung Pasir Panjang. Jumat, 6 September 2024.

[38] Menurut PPATK, pihak-pihak yang secara umum dan diketahui publik mempunyai hubungan dekat dengan PEP juga dikategorikan sebagai PEP. Lihat Pasal 5 ayat b dalam Peraturan PPATK No. 02 tahun 2015 tentang Kategori Pengguna Jasa yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang. Diakses melalui https://jdih.ppatk.go.id/storage/dokumen_produk_hukum/PERKA%20No.%202%20Tahun%202015%20ttg%20Kategori%20Pengguna%20Jasa%20Yang%20Berpotensi%20Melakukan%20TPPU.pdf

Penutup: Mencari Titik Tengah, Menaja Jalan Keluar

Kesimpulan

Hari ini kita menyaksikan bagaimana program transisi ke energi ramah lingkungan justru memperkuat ketimpangan dan hierarki yang mengakar. Imaji masa depan emisi nol bersih karbon dalam kesepakatan JETP masih menjadi *paper parks*, alih-alih upaya konkret menciptakan keadilan. Bukannya menciptakan pemerataan dan keadilan dalam pembangunan, PSN Rempang sedari dini sudah memperkeruh ruang hidup dan penghidupan masyarakat sekitarnya. Mudahnya bongkar-pasang daftar PSN juga menegaskan ada masalah struktural pada aspek *legal environment*-nya, yang disertai dengan proses evaluasi yang minim. Bahkan, upaya menerjemahkan pembangunan *Rempang Eco City* lekat dengan konflik kepentingan.

Demo warga Rempang di depan Kantor BP Batam, 23 Agustus 2024.

Atas nama investasi, bukannya menjadi tameng kala konflik menguak, negara justru mengerdilkan persoalan Rempang sebagai miskomunikasi semata. Jika benar demikian, bagaimana mungkin bentrok 7 September 2023 terjadi jika bukan karena proses konsultasi dan partisipasi yang absen? Hasil *Infrastructure Corruption Risk Assessment Tool* (ICRAT) yang digagas Transparency International Indonesia (2023) menemukan bahwa persoalan konflik di tingkat tapak merupakan ekses dari buruknya uji tuntas integritas dalam tahap perencanaan dan pemilihan proyek PSN itu sendiri. Situasi ini makin kompleks di tengah sektor infrastruktur pada zaman Jokowi yang sarat akan praktik demokrasi yang absen, nihil partisipasi publik bermakna, dan tutup mata terhadap prinsip *good governance*.

Peristiwa yang sedang berlangsung di Rempang hanyalah sebagian kecil dari fenomena gunung es, mengingat dalam narasi besar produksi energi dunia, ada suatu ketidakadilan yang kerap mengancam daerah-daerah yang terpencil dan miskin (dalam kacamata pembangunan hari ini) yang justru menjadi penyuplai kebutuhan energi global. Fenomena tersebut nyata dalam konteks Indonesia, di saat dunia sedang berusaha meningkatkan konsumsi energi hijau dan banyak negara mulai menginisiasi pembicaraan internasional tentang *climate justice*, gagasan tentang transisi energi hijau yang "adil" sepertinya gagal menjangkau tempat-tempat seperti Rempang—lebih-lebih memperlebar kesenjangan yang ada. Tampaknya untuk mengadvokasi isu ini kita perlu mempertimbangkan kemungkinan adanya pihak yang 'menang' dan 'kalah' dalam proses transisi energi di negara ini.

Terlebih, selagi negara sekonyong-konyong menggadai sumber daya mereka untuk investasi, masyarakat di pulau-pulau kecil di sekitar Batam hanya menerima listrik empat sampai enam jam sehari dari PLN. Kata yang jauh dari keadilan bertransisi. Mereka akhirnya hanya akan menjadi residu dalam sistem pembangunan yang kapitalistik. Hal ini kontras dengan fokus pemerintah pada investasi besar yang sering kali mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat lokal. Kajian ini diharapkan dapat menjadi secuil kontribusi untuk terus menjaga nyala api keadilan, memastikan bahwa dalam setiap langkah pembangunan, tidak ada pihak yang tertinggal dan semua masyarakat mendapatkan manfaat yang adil dan merata termasuk bagi masyarakat lokal untuk memastikan suara mereka turut didengar dalam narasi transisi energi hijau global.

Seorang warga di tangkap di aksi demo bela Rempang di Depan Kantor BP Batam, 11 September 2024.

Rekomendasi

Pada prinsipnya, persoalan transisi energi berkeadilan mestinya dibarengi dengan penyelesaian ketimpangan akibat kebijakan dan permasalahan masa lalu. Negara harus hadir sebagai jembatan kebijakan yang membela komunitas marjinal, seperti masyarakat adat di sekitar Batam dan Kepulauan Riau, yang telah dirugikan secara sistematis oleh hukum dan kebijakan yang berlaku. Sebab negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan seluruh warganya, termasuk kelompok marjinal. Maka sudah seharusnya, negara mengambil sikap yang proaktif, membuat strategi dengan penekanan keadilan yang restoratif (*restorative justice*) untuk menciptakan pemerataan sebelum betul-betul melaksanakan transformasi ke energi ramah lingkungan.

Sementara megaproyek *Rempang Eco City* terus dipaksakan berjalan, terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencari jalan keluar dari konflik Rempang, antara lain:

1. Persoalan transisi menuju energi ramah lingkungan berkelindan dengan isu tenurial dan kesenjangan kuasa atas tanah. Status tanah adat yang didasarkan pada sistem waris, bukti kepemilikan dalam konteks sertifikasi tanah kebijakan agraria saat ini (sebagaimana juga kebijakan kolonial *domein verklaring*) kerap menjadi akar dari kasus-kasus penggusuran dan relokasi yang sering terjadi di Pulau Rempang. **Maka Pemerintah harus mengakui keberadaan komunitas adat dan hak ulayatnya.**

2. Upaya transisi energi melalui program *Just Energy Transition Partnership* (JETP) harus berlandaskan nilai-nilai keadilan. Keadilan harus menjadi landasan bagi transisi energi agar amanat konstitusi Indonesia yang menghendaki terpenuhinya hak mendapatkan lingkungan yang baik dapat terlaksana dengan adil. Proyek *Rempang Eco City* terafiliasi dengan area investasi JETP sebagai bagian dari penguatan rantai pasok energi terbarukan berupa kaca untuk panel surya. Proyek *Rempang Eco City* juga seharusnya berlandaskan prinsip-prinsip keadilan.

3. Masyarakat adat yang terdampak telah kehilangan akses ke tanah adat yang diturunkan kepada mereka dari generasi ke generasi. Tanah adat memiliki nilai budaya dan spiritual yang tinggi bagi masyarakat adat. **Dalam konteks Rempang, pemerintah harus memulihkan hak-hak tanah adat, untuk menjaga identitas budaya dan keberlanjutan komunitas adat yang mendiami kawasan Pulau Rempang.**

4. Imaji futuristik Rempang 'hijau' dalam konteks transisi energi sedang dibangun oleh para stakeholder dan pengembang di tengah kehidupan sosial masyarakat di Kepulauan Riau, setidaknya di Batam, Rempang, dan Galang. Ke depan, Rempang akan menjadi kota satelit modern yang menjembatani kerjasama bilateral di bidang energi Indonesia-Singapura, meskipun demikian proses pengembangan kawasan ini terindikasi menyerobot hak hidup dan hak atas tanah dari komunitas masyarakat yang menempati kawasan ini selama puluhan bahkan ratusan tahun. **Oleh karena itu Pemerintah harus melakukan peninjauan ulang untuk mengidentifikasi dan memperbaiki ketidakadilan yang ada dalam kebijakan pengembangan kawasan tersebut.**

5. Aspirasi masyarakat sering kali tidak diikutsertakan dalam proyek energi, seolah-olah sudut pandang mereka kalah suara dan tidak penting. Dalam konteks Rempang Eco City, hal ini dapat mengakibatkan berbagai permasalahan yang merugikan baik bagi masyarakat lokal maupun para pelaku bisnis energi sendiri (politisi, pebisnis, birokrat). **Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa aspirasi dan perspektif masyarakat diikutsertakan dengan serius. Namun bila masyarakat sepakat untuk menolak proyek ini, pemerintah harus menghargai aspirasi tersebut dengan membatalkan proyek Rempang Eco City.**

Perempuan warga Rempang menyampaikan orasi penolakan relokasi di Jembatan 4 Barelang, Batam, Sabtu, 7 September 2024.

Daftar Pustaka

Buku & Laporan Riset

Cowdock, B., (2018) T*he Cost of Secrecy; The Role Played by Companies Registered in The UK's Overseas Territories in Money Laundering and Corruption*. Transparency International UK.

Deacon, D., Pickering, M., Golding, P., & Murdock, G. (2021). Researching communications: A practical guide to methods in media and cultural analysis. Bloomsbury Publishing USA.

IEA (2022), *Solar PV Global Supply Chains*, IEA, Paris https://www.iea.org/reports/solar-pv-global-supply-chains, Licence: CC BY 4.0 diakses pada 26 Juli 2024.

Karasu, B., Oytaç, Z., Ergani, E., & Buluç, A. (2020). Solar glass panels: a review. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (20), 548-565.

Moore, N. (2006). How to do research: a practical guide to designing and managing research projects. Facet publishing.

Solidaritas Nasional untuk Rempang (2023) *Keadilan Timpang Di Pulau Rempang: Temuan Awal Investigasi atas Peristiwa Kekerasan dan Pelanggaran HAM 7 September 2023 di Pulau Rempang*. Laporan Aliansi dipublis oleh Kontras.org diakses pada 27 Juli 2024 melalui https://www.kontras.org/wp-content/uploads/2023/09/Final_Temuan_Awal_Investigasi_atas_Peristiwa_Kekerasan_dan_Pelanggaran_compressed-1.pdf

Walhi & Aman (2023) *Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City: Strategis Untuk Siapa?*. Rilis bersama Walhi & Aman 20 September 2023

Berita dan Sumber Internet

Arief, A.M., (2023) Produksi Panel Surya, Xinyi Group Gunakan Energi dari PLTU di Rempang, diakses pada 27 Juli 2024 melalui https://katadata.co.id/berita/industri/651a8c1ce5ce7/produksi-panel-surya-xinyi-group-gunakan-energi-dari-pltu-di-rempang

ASEAN (2015) *ASEAN Power Grid Enhancing Electricity Interconnectedness*. Diakses pada 21 Juli 2023 melalui https://asean.org/wp-content/uploads/images/2015/October/outreach-document/Edited%20APG-3.pdf

Biro Komunikasi Kementerian ESDM (2023) *Sahkan RUPTL PT PLN Batam 2023-2032, Pemerintah Dukung PT PLN Batam Tingkatkan Keandalan Sistem*. Siaran Pers No: 201.Pers/04/SJI/2023. Diakses pada 23 Juni 2024 melalui https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/sahkan-ruptl-pt-pln-batam-2023-2032-pemerintah-dukung-pt-pln-batam-tingkatkan-keandalan-sistem

Biro Komunikasi Kemenko Perekonomian (2023) *Menko Airlangga: Dorong Tingkat Pembangunan Nasional Lebih Tinggi, Pemerintah Akselerasi Kebijakan Satu Peta Serta Kembangkan PSN dan KEK.* Siaran Pers No.HM.4.6/254/SET.M.EKON.3/07/2024. Diakses pada 9 September 2024 melaluihttps://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5882/menko-airlangga-dorong-tingkat-pembangunan-nasional-lebih-tinggi-pemerintah-akselerasi-kebijakan-satu-peta-serta-kembangkan-psn-dan-kek

Chavkin, S., (2019) *US Poised To Crack Down On Anonymous Shell Companies*. Diakses pada 23 Juli 2024 melalui https://www.icij.org/investigations/paradise-papers/us-poised-to-crack-down-on-anonymous-shell-companies/

CNN Indonesia (2023) *Batam Kekurangan Listrik, PLN Minta Pelanggan Industri Nyalakan Genset*. Diakses pada 24 Juli 2024 melalui https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230522131216-85-952406/batam-kekurangan-listrik-pln-minta-pelanggan-industri-nyalakan-genset

David Stringer (2023) *Singapore's Plan to Import Indonesia's Clean Energy Is Advancing.* Diakses pada 28 Juli 2024 melaluihttps://www.bloomberg.com/news/articles/2023-09-08/singapore-s-plan-to-import-indonesia-s-clean-energy-is-advancing

Dinsights Katadata (2023) PLN to Revise Electricity Procurement after JETP Investment Completed. Diakses pada 23 Juli 2024 melalui https://dinsights.katadata.co.id/read/2023/06/26/pln-to-revise-electricity-procurement-after-jetp-investment-completed

Dinsights Katadata (2023) *Harvesting Sunshine in Indonesia's Riau Islands: Who's In, Who's Out?* Diakses pada 28 Juli 2024 melalui https://dinsights.katadata.co.id/read/2023/06/12/harvesting-sunshine-in-indonesias-riau-islands-whos-in-whos-out

Dorothy, L.T.T., (2024) *Offshore Leaks Database*, diakses pada 2 September 2024 melalui https://offshoreleaks.icij.org/nodes/75060

Fitra Q.U., (2023) *Latar Belakang Investasi Pulau Rempang, Sudah Ada Sejak Tahun 2004*. Diakses pada 9 September 2024 melalui https://ariranews.com/24/08/2023/latar-belakang-investasi-pulau-rempang-sudah-ada-sejak-tahun-2004/

Gunawan, C., (2023) *Awal Mula Investasi di Pulau Rempang Dimulai Era Nyat Kadir pada 2004*. Diakses pada 9 September 2024 melalui https://gokepri.com/awal-mula-investasi-di-pulau-rempang-dimulai-era-nyat-kadir-pada-2004/

Indonesia Living Guide (2023) *President Jokowi witnessed the signing of the cooperation agreement on Rempang Island Photovoltaic Industrial Park, with a total investment of 11.6 billion US dollars!*. Diakses pada 31 Juli 2023 melalui https://mp.weixin.qq.com/s/Ytl7z2udMpZs3AYEgOYLeA

Kaja-group.com (2021) *Tentang Kami - Kaja Group*, diakses pada 23 Juli 2024 melalui https://kaja-group.com/id/tentang-kami/

Kemenko Perekonomian (2024) *Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (PSN), Presentasi Rekapitulasi Permenko 6 Tahun 2024*. Diakses pada 9 September 2024 melalui https://www.scribd.com/document/741567875/240514-Rekapitulasi-Permenko-6-2024

KPPIP (2023) *Laporan KPPIP Semester II 2023*. Diakses pada 9 September 2024 melalui https://kppip.go.id/wp-content/uploads/filebase/laporan_semester_kppip/Laporan-KPPIP-2023-semester-02.pdf

Makmurelokgraha.co.id (2024) *Manajemen PT Makmur Elok Graha*. Diakses pada 23 Juli 2024 melalui https://makmurelokgraha.co.id/management/

Media Indonesia (2024) *PIK dan BSD Jadi PSN, Pengamat: Politik Balas Budi Jokowi ke Investor IKN*, diakses pada 9 September 2024 melalui https://www.metrotvnews.com/read/bmRCeEMn-pik-dan-bsd-jadi-psn-pengamat-politik-balas-budi-jokowi-ke-investor-ikn

Muhid, H.K., (2024) *Profil Aguan dan Eka Tjipta Widjaja, Pemilik PIK dan BSD yang Masuk PSN Jokowi*, diakses pada 9 September 2024 melalui https://bisnis.tempo.co/read/1851248/profil-aguan-dan-eka-tjipta-widjaja-pemilik-pik-dan-bsd-yang-masuk-psn-jokowi?page_num=2

Nurfaizah, A., (2022) *Koalisi Masyarakat Sipil Menyerukan Transisi Energi yang Berkeadilan.* Kompas.id diakses pada 27 Juli 2024 melalui https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/10/20/koalisi-masyarakat-serukan-transisi-energi-yang-berprinsip

Pandu, R. (2023) *Bahlil: Jokowi minta PSN selesai di semester pertama 2024*. Antaranews.com diakses pada 9 September 2024 melalui https://www.antaranews.com/berita/3758556/bahlil-jokowi-minta-psn-selesai-di-semester-pertama-2024

Pelitatoday.com (2023) *Tahun 2004 Silam, PT MEG Terpilih Kelola Pulau Rempang*. Diakses pada 9 September 2024 melalui https://www.pelitatoday.com/2023/08/tahun-2004-silam-pt-meg-terpilih-kelola.html#google_vignette

Peraturan Kepala PPATK No :Per- 02 / 1.02 / Ppatk/ 02 / 15 tentang Kategori Pengguna Jasa Yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pitoko, R.A., (2023) *Peran Tomy Winata di Proyek Rempang Eco-City*. Diakses pada 23 Juli 2024 melalui https://www.idntimes.com/business/economy/ridwan-aji-pitoko-1/peran-tomy-winata-di-proyek-rempang-eco-city.

Ramli, R.R & Aprilia Ika (2024) *Pemerintah Beberkan Alasan PIK 2 dan BSD Masuk Daftar PSN*. Diakses pada 9 September 2024 melalui https://money.kompas.com/read/2024/03/28/093000226/pemerintah-beberkan-alasan-pik-2-dan-bsd-masuk-daftar-psn

Sampson, E., (2023) *Criminals and oligarchs are hiding wealth in secretive Dutch foundations, new investigation finds*. International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) diakses pada 2 September 2024 melalui https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/criminals-and-oligarchs-are-hiding-wealth-in-secretive-dutch-foundations-new-investigation-finds/

Sulistyowati, R., (2019) *Adithya Prakarsa Winata, Putra Tomy Winata: Infrastruktur di Tual Sudah Siap.*Majalah Tempo Sabtu 16 November 2019. Diakses 23 Juli 2024 melalui https://majalah.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/158783/adithya-prakarsa-winata-putra-tomy-winata-infrastruktur-di-tual-sudah-siap

Tax Justice Network. (2021). *British Virgin Islands*. Diakses pada 23 Juli 2024 melalui https://taxjustice.net/country-profiles/british-virgin-islands/

Xinyiglass.com (2019) *About Us Company Profil*. Diakses pada 27 Juli 2024 melalui https://www.xinyiglass.com/en/company/index.aspx

Yuniarto, T., (2024) *Pulau Rempang, Eco City, dan Konflik Agraria*, Kompas.id diakses pada 29 September 2023 melalui https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/pulau-rempang-eco-city-dan-konflik-agraria

TREND ASIA

TRANSPARENCY
INTERNATIONAL
Indonesia
the global coalition against corruption

YLBHI

WALHI
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

PBHI

WALHI
RIAU

LBH PEKANBARU

KIARA
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan

KontraS
Komisi untuk Orang Hilang
dan Korban Tindak Kekerasan

Perhimpunan Pembela
Masyarakat Adat Nusantara